



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
KOTA JAMBI

Kota Jambi
Bahagia



Profil **GENDER**

KOTA JAMBI TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan semangat kolaboratif, kami **Tim Penyusun Buku Profil Gender Kota Jambi Tahun 2025**, mempersembahkan dokumen ini sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif, responsif terhadap isu gender, dan berkeadilan sosial.

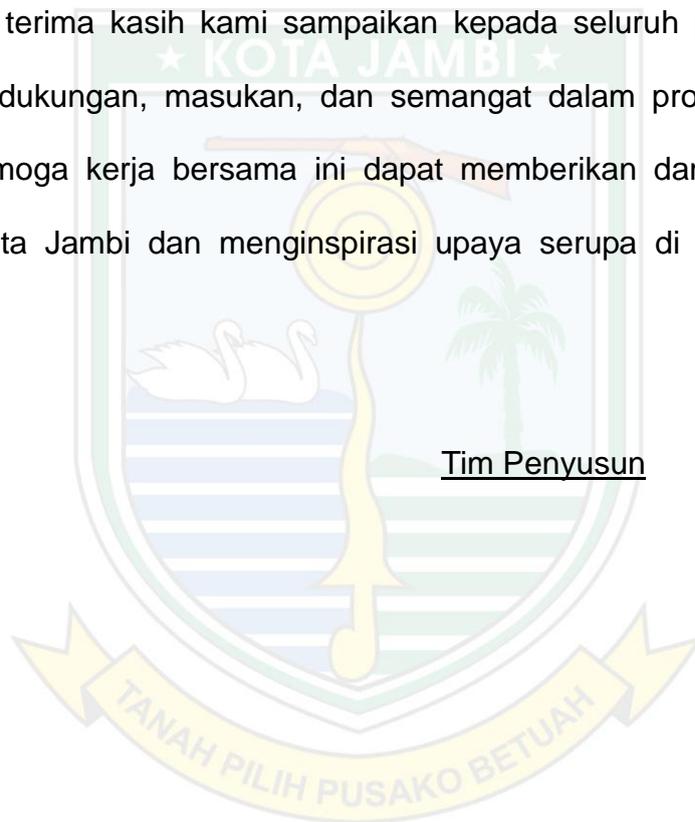
Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh komitmen kuat untuk menghadirkan data dan analisis yang tidak hanya terpilah secara statistik, tetapi juga menggambarkan pengalaman nyata perempuan, anak, dan kelompok rentan di Kota Jambi. Kami percaya bahwa pembangunan yang berpihak pada seluruh lapisan masyarakat memerlukan pemahaman mendalam terhadap ketimpangan, tantangan struktural, serta potensi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Proses penyusunan ini melibatkan lintas perangkat daerah serta dukungan berbagai pemangku kepentingan yang turut memberikan kontribusi dalam bentuk data, diskusi kebijakan, dan praktik lapangan. Kami menyadari bahwa dokumen ini belum sepenuhnya sempurna, namun semangat untuk menghadirkan potret pembangunan yang berkeadilan menjadi ruh utama dalam setiap bab yang tersusun.

Harapan kami, Buku Profil Gender ini tidak sekadar menjadi dokumen laporan, melainkan menjadi titik tolak perbaikan kebijakan, penyusunan program, dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan “**Kota Jambi Bahagia**” sesuai dengan visi pembangunan daerah yang menjunjung kesejahteraan, partisipasi, dan perlindungan hak setiap warga.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan semangat dalam proses penyusunan buku ini. Semoga kerja bersama ini dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan Kota Jambi dan menginspirasi upaya serupa di berbagai daerah lainnya.

Tim Penyusun



SAMBUTAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPMPPA) KOTA JAMBI

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga **Buku Profil Gender Kota Jambi Tahun 2025** ini dapat disusun dengan baik sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan berkeadilan sosial.

Penyusunan buku ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan program strategis "**Kota Jambi Bahagia**" yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara utuh, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu pilar penting dari visi Jambi Bahagia adalah *terpenuhinya hak-hak dasar perempuan, anak, dan kelompok rentan melalui akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, perlindungan hukum, serta partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan publik*. Profil ini menjadi sarana penting dalam menyajikan data terpilah dan analisis mendalam untuk memastikan bahwa pembangunan yang kita jalankan benar-benar menyentuh seluruh elemen masyarakat.

Buku ini memuat berbagai informasi strategis mengenai kondisi kesetaraan gender di Kota Jambi, termasuk capaian, tantangan, dan peluang penguatan kelembagaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Harapannya, dokumen ini tidak sekadar menjadi bahan

bacaan, melainkan menjadi acuan konkret bagi para pengambil kebijakan, perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan lainnya dalam merancang intervensi yang relevan dan berdampak.

Atas tersusunnya buku ini, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun, perangkat daerah, mitra organisasi, dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi data, pemikiran, serta semangat kolaboratif yang luar biasa. Semoga kerja bersama ini menjadi pijakan menuju Kota Jambi yang semakin Bahagia, adil, setara, dan bermartabat bagi seluruh warganya.

Jambi, Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi



Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19711125 199201 2 001

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME
(Kepala Dinas PMPPA)

H. Hendy Sauki, S. Sos
(Sekretaris Dinas PMPPA)

Penanggung Jawab :

Hj. Rosdalia, SH, MH
(Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak)

Penulis Naskah :

Deki Kurniawan, S. Pt
(JFT Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

Editor :

M. Khoirul Rizal, S. Kom
(Pranata Komputer Ahli Pertama)

Kontributor Data

Irma Rosita, SE (JFT Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

Zahara, S. Pdi (JFT Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

Elvira Savitri (Arsiparis Terampil)

Bram Kurniawan, SE (Penata Layanan Operasional)

Andi Nugraha, SE (Penata Layanan Operasional)

Marino Sumarganda, S. Kom (Penata Layanan Operasional)

Sanggup Rehulina Sitanggang (Pengadministrasian Perkantoran)

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| TIM PENYUSUN | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 9 |
| A. Latar Belakang | 9 |
| B. Tujuan..... | 13 |
| C. Sumber Data | 15 |
| BAB II GAMBARAN UMUM | 17 |
| A. Kondisi Geografis | 17 |
| B. Visi dan Misi Kota Jambi..... | 22 |
| BAB III KEPENDUDUKAN | 23 |
| A. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 23 |
| B. Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin | 25 |
| C. Penduduk Produktif | 27 |
| BAB IV PENDIDIKAN | 29 |
| A. Angka Partisipasi Sekolah (APS) | 32 |
| B. Angka Partisipasi Murni (APM)..... | 34 |
| C. Angka Partisipasi Kasar (APK)..... | 36 |
| D. Angka Melek Huruf | 38 |
| E. Angka Putus Sekolah | 41 |
| F. Angka Kelulusan..... | 43 |
| BAB V KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 46 |
| A. Jaminan Kesehatan Nasional..... | 51 |
| B. Angka Harapan Hidup | 53 |
| C. Penderita HIV/ AIDS | 54 |

| | |
|--|------------|
| D. Keluarga Berencana (KB)..... | 56 |
| E. Usia Perkawinan Pertama | 60 |
| BAB VI KETENAGAKERJAAN | 62 |
| A. Penduduk Usia Kerja..... | 66 |
| B. Pencari Kerja Terdaftar | 68 |
| C. Tenaga Kerja Migran | 69 |
| D. Pengangguran..... | 71 |
| E. Pekerja Terkena PHK | 74 |
| F. Koperasi | 76 |
| BAB VII PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK..... | 79 |
| A. Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif | 81 |
| B. Perempuan di Pemerintahan | 83 |
| C. Organisasi Perempuan..... | 87 |
| D. Perempuan di Sektor Pertanian..... | 91 |
| BAB VIII HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA | 94 |
| A. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 95 |
| B. Perempuan Kepala Keluarga..... | 98 |
| BAB IX PENUTUP | 101 |
| A. Kesimpulan..... | 101 |
| B. Saran..... | 103 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesetaraan gender merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan yang berkelanjutan. Gender tidak hanya berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, tetapi juga mencakup akses terhadap sumber daya, kesempatan ekonomi, pendidikan, kesehatan serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kota Jambi, sebagai salah satu kota berkembang di Indonesia, memiliki dinamika sosial yang terus berubah, termasuk dalam hal peran gender di berbagai sektor kehidupan. Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender semakin meningkat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan, termasuk melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, meskipun telah terjadi kemajuan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan dalam partisipasi perempuan di sektor formal, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, serta peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi.

Di Kota Jambi, perempuan memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun dunia kerja. Namun, masih terdapat hambatan struktural yang membatasi akses perempuan terhadap peluang ekonomi yang lebih luas. Dalam bidang pendidikan, misalnya, meskipun angka partisipasi perempuan dalam pendidikan dasar dan menengah telah meningkat, masih terdapat kesenjangan dalam hal kualitas pendidikan dan kesempatan bagi perempuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Faktor ekonomi dan sosial sering kali menjadi penghambat bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Selain itu, beban ganda yang dialami Perempuan sebagai pekerja sekaligus pengurus rumah tangga sering kali menjadi kendala dalam mengembangkan potensi mereka.

Dalam bidang kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan bagi perempuan telah mengalami peningkatan, terutama dalam hal pelayanan kesehatan ibu dan anak. Program kesehatan ibu hamil, imunisasi, serta layanan kesehatan reproduksi telah diperkuat untuk memastikan kesejahteraan perempuan. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, terutama bagi perempuan kelompok ekonomi lemah. Isu kesehatan reproduksi dan akses terhadap informasi mengenai kesehatan seksual masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Banyak perempuan yang belum mendapatkan edukasi yang cukup mengenai kesehatan reproduksi, sehingga rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk tingginya angka kematian ibu akibat komplikasi kehamilan dan persalinan.

Selain itu, keterwakilan perempuan dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan masih tergolong rendah dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun telah ada kebijakan afirmatif yang mendorong peningkatan jumlah perempuan dalam politik dan pemerintahan, tantangan masih tetap ada. Faktor budaya, sosial, dan ekonomi sering kali menjadi penghambat bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Banyak perempuan yang menghadapi hambatan struktural, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan politik, minimnya dukungan sosial, serta stereotip gender yang masih kuat dalam masyarakat. Padahal, peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat lebih inklusif dan memperhatikan kebutuhan perempuan serta kelompok rentan. Dengan adanya lebih banyak perempuan dalam posisi kepemimpinan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap isu-isu gender dan mendorong pembangunan yang lebih berkeadilan.

Dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, perempuan telah berkontribusi dalam berbagai sektor pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal. Banyak perempuan yang terlibat dalam sektor informal, seperti usaha kecil dan menengah, perdagangan, serta industri rumah tangga. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam hal akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja yang setara. Perempuan sering kali menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja, baik dalam bentuk upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, keterbatasan akses terhadap posisi kepemimpinan, maupun minimnya perlindungan sosial bagi pekerja perempuan. Selain itu, banyak perempuan yang bekerja di sektor

informal tanpa perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak layak.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dalam berbagai bidang, seperti program pemberdayaan perempuan, akses terhadap kredit usaha, serta pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing perempuan dalam dunia kerja. Pemerintah Kota Jambi telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui berbagai program, namun masih diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret dan berkelanjutan agar kesetaraan gender benar-benar terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Buku profil gender Kota Jambi ini disusun sebagai upaya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi gender di kota ini. Dengan mengidentifikasi berbagai indikator gender, seperti tingkat partisipasi perempuan dalam ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta keterlibatan dalam pengambilan Keputusan. Buku ini bertujuan untuk menjadi referensi bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Melalui pemetaan kondisi gender yang komprehensif, diharapkan buku ini dapat menjadi dasar bagi perumusan strategi pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan. Dengan adanya data dan analisis yang akurat, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan gender dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara.

Selain itu, profil gender ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Dengan adanya data yang terstruktur dan terperinci, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang masih membutuhkan perhatian lebih serta merancang program yang lebih tepat sasaran. Penyusunan profil gender ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum. Dengan adanya informasi yang jelas dan terstruktur, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kesetaraan gender dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

Kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Kota Jambi dapat menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara bagi semua. Oleh karena itu, penyusunan buku profil gender ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Tujuan

Penyusunan Buku Profil Gender Kota Jambi Tahun 2025 merupakan bagian integral dari komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan *visi Kota Jambi Bahagia 2030*, yaitu kota perdagangan dan jasa yang bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, dan sejahtera. Dokumen ini disusun sebagai landasan strategis untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap isu-isu gender.

Profil ini bertujuan untuk menghadirkan data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin secara sistematis dan komprehensif, sehingga mampu menggambarkan kondisi, peran, serta partisipasi perempuan dan laki-laki dalam berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Dengan demikian, profil ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan 11 program unggulan Kota Jambi Bahagia, khususnya program Kampung Bahagia, Kartu Bahagia, Bank Harkat, dan Lansia Bahagia, yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan.

Melalui pemanfaatan data gender yang akurat, Pemerintah Kota Jambi dapat merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam pengalokasian dana Rp100 juta per RT melalui Program Kampung Bahagia untuk pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Buku ini juga mendukung pelaksanaan Kartu Bahagia, yang memastikan keluarga miskin dan rentan memiliki akses terhadap bantuan sosial secara terintegrasi.

Secara keseluruhan, Buku Profil Gender ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen statistik, tetapi juga sebagai alat advokasi dan monitoring yang mendukung transformasi sosial menuju masyarakat Kota Jambi yang lebih bahagia, sejahtera, dan berdaya.

C. Sumber Data

Penyusunan buku profil gender Kota Jambi didasarkan pada berbagai sumber data yang diperoleh dari instansi pemerintah, khususnya **Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Jambi** dan **Badan Pusat Statistik (BPS)**. Data yang digunakan dalam buku ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial ekonomi, serta keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Dengan adanya data yang akurat dan terverifikasi, diharapkan analisis yang disajikan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi gender di Kota Jambi serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Data yang diperoleh dari OPD Kota Jambi mencerminkan berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Pemerintah daerah secara aktif mengembangkan berbagai inisiatif untuk mendukung pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta peningkatan akses perempuan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, data dari OPD juga mencakup informasi mengenai partisipasi perempuan dalam dunia kerja, tingkat kesejahteraan sosial, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

Sementara itu, data dari BPS Kota Jambi memberikan informasi statistik yang lebih luas mengenai kondisi sosial dan ekonomi perempuan di kota ini. Melalui sensus dan survei yang dilakukan secara berkala, BPS menyediakan data mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan perempuan, akses terhadap layanan kesehatan, serta tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan. Selain itu, data dari BPS juga mencakup informasi mengenai

kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, tingkat kemiskinan perempuan, serta keterwakilan perempuan dalam pemerintahan dan sektor publik.

Selain itu, data yang digunakan dalam buku ini juga mencerminkan tren perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, perubahan pola pendidikan perempuan, serta akses terhadap layanan kesehatan yang semakin membaik. Dengan memahami tren ini, pemerintah dan masyarakat dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Jambi.

Selain sebagai alat analisis, data yang digunakan dalam buku ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Dengan adanya data yang terstruktur dan terperinci, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang masih membutuhkan perhatian lebih serta merancang program yang lebih tepat sasaran.

Penyusunan buku profil gender ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum. Dengan adanya informasi yang jelas dan terstruktur, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kesetaraan gender dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan buku ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis

Kota Jambi merupakan ibu kota Provinsi Jambi yang memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah Sumatra. Secara geografis, Kota Jambi terletak di bagian timur Provinsi Jambi dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, serta aktivitas sosial masyarakat. Dengan luas wilayah yang cukup signifikan, Kota Jambi memiliki karakteristik geografis yang beragam, mencakup daerah perkotaan yang berkembang pesat serta wilayah yang masih mempertahankan ekosistem alami.

Secara astronomis, Kota Jambi berada pada koordinat $\pm 1^{\circ}30' - 1^{\circ}40'$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}30' - 103^{\circ}40'$ Bujur Timur. Posisi ini menjadikan Kota Jambi memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif stabil sepanjang tahun. Curah hujan yang cukup tinggi serta kelembaban udara yang tinggi menjadi ciri khas dari kondisi iklim di kota ini. Faktor geografis ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor pertanian, perdagangan, serta pola pemukiman.

Dari segi batas wilayah, Kota Jambi berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu:

- **Sebelah Utara** berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.
- **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.
- **Sebelah Timur** berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.

- **Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.

Kota Jambi memiliki topografi yang relatif datar dengan beberapa daerah yang memiliki kontur tanah berbukit. Ketinggian wilayah Kota Jambi berkisar antara 10 hingga 50 meter di atas permukaan laut, yang menjadikannya sebagai daerah yang cukup aman dari risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor. Namun, karena berada di daerah dengan curah hujan tinggi, Kota Jambi masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan air dan potensi banjir di beberapa wilayah tertentu.

Salah satu elemen geografis yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Kota Jambi adalah **Sungai Batanghari**, yang merupakan sungai terpanjang di Sumatra. Sungai ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat, tetapi juga menjadi jalur transportasi utama bagi aktivitas perdagangan dan distribusi barang. Keberadaan Sungai Batanghari juga berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi lokal, terutama dalam sektor perikanan dan perdagangan.

Selain itu, Kota Jambi memiliki beberapa kawasan hijau dan hutan kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota serta area konservasi lingkungan. Keberadaan ruang terbuka hijau ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal rekreasi dan kesehatan lingkungan.

Sebagai daerah yang berada di wilayah tropis, Kota Jambi memiliki dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan Oktober hingga Maret, dengan curah hujan yang cukup tinggi dan kelembaban udara yang meningkat. Sementara itu, musim kemarau

berlangsung antara bulan April hingga September, dengan suhu udara yang lebih panas dan tingkat curah hujan yang lebih rendah.

Suhu rata-rata di Kota Jambi berkisar antara 24°C hingga 32°C, dengan kelembaban udara yang cukup tinggi sepanjang tahun. Kondisi ini berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Tanaman seperti kelapa sawit, karet, dan padi menjadi komoditas utama yang berkembang di wilayah ini, karena mampu beradaptasi dengan kondisi iklim yang ada.

Selain itu, pola curah hujan yang tinggi juga berpengaruh terhadap potensi banjir di beberapa wilayah Kota Jambi. Daerah yang berada di sekitar Sungai Batanghari sering kali mengalami peningkatan debit air saat musim hujan, sehingga diperlukan sistem drainase yang baik untuk mengatasi risiko banjir. Pemerintah Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan infrastruktur pengelolaan air, termasuk pembangunan tanggul dan sistem kanal untuk mengurangi dampak banjir terhadap pemukiman warga.

Keadaan geografis Kota Jambi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan kota dan pola pemukiman masyarakat. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Provinsi Jambi, kota ini terus mengalami pertumbuhan yang pesat dalam berbagai sektor. Infrastruktur yang semakin maju serta aksesibilitas yang semakin baik menjadikan Kota Jambi sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam perdagangan, industri, dan pariwisata.

Keberadaan Sungai Batanghari sebagai jalur transportasi utama telah mendorong perkembangan sektor perdagangan dan distribusi barang. Banyak

aktivitas ekonomi yang bergantung pada sungai ini, termasuk perdagangan hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu, kawasan di sekitar sungai juga menjadi pusat pemukiman dan aktivitas sosial masyarakat, dengan berbagai fasilitas umum yang dibangun untuk mendukung kehidupan warga.

Sebagai pusat administrasi dan perdagangan, Kota Jambi memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari **11 kecamatan** dan **68 kelurahan**. Pembagian wilayah ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan administrasi, pelayanan publik, serta pembangunan daerah yang lebih merata.

Secara administratif, Kota Jambi terbagi menjadi beberapa kecamatan yang masing-masing memiliki kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil. Berikut adalah daftar kecamatan beserta jumlah kelurahannya:

Tabel 2.1

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Jambi

| No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
|--------------|---------------|------------------|
| 1. | Kota Baru | 7 |
| 2. | Alam Barajo | 7 |
| 3. | Jambi Selatan | 5 |
| 4. | Paal Merah | 6 |
| 5. | Jelutung | 7 |
| 6. | Pasar Jambi | 4 |
| 7. | Telanaipura | 7 |
| 8. | Danau Sipin | 5 |
| 9. | Danau Teluk | 5 |
| 10. | Pelayangan | 6 |
| 11. | Jambi Timur | 9 |
| Total | | 68 |

Sumber : BPS Kota Jambi tahun 2025

Pembagian kecamatan dan kelurahan di Kota Jambi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Setiap kecamatan memiliki kewenangan dalam mengelola berbagai aspek pemerintahan, termasuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya lokal.

Kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Kelurahan bertanggung jawab dalam berbagai program sosial, seperti pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan warga. Selain itu, kelurahan juga berperan dalam mendukung program pemerintah daerah, seperti peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Program digitalisasi administrasi, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur publik menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya pembagian wilayah yang jelas, diharapkan Kota Jambi dapat terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan sosial budaya di Provinsi Jambi. Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat pembangunan guna mewujudkan kota yang lebih maju, inklusif dan berkelanjutan.

B. Visi dan Misi Kota Jambi

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2025 - 2030 adalah :

“ MEWUJUDKAN KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERSIH, AMAN, HARMONIS, AGAMIS, INOVATIF DAN SEJAHTERA ”

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan ketertiban, ketenteraman lingkungan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Penguatan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan
3. Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan
4. Penguatan kualitas sumber daya manusia
5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik

BAB III

KEPENDUDUKAN

A. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Penduduk tidak hanya menjadi subjek, tetapi juga objek pembangunan. Tanpa pemahaman yang baik mengenai kondisi dan dinamika penduduk, upaya pembangunan dapat menjadi tidak tepat sasaran dan kurang efektif. Oleh karena itu, studi tentang kependudukan menjadi landasan penting dalam perencanaan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Perubahan jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dari waktu ke waktu menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menjadi pendorong tenaga kerja dan pasar konsumsi. Di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia dan perencanaan yang matang, hal ini dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti pengangguran, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan dan peluang dalam aspek kependudukan. Ketimpangan distribusi, urbanisasi yang cepat, serta perbedaan tingkat kelahiran dan kematian antar daerah menjadi isu yang perlu dicermati secara mendalam.

Data kependudukan yang terpilah berdasarkan jenis kelamin memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Dengan adanya data yang jelas mengenai jumlah laki-laki dan

perempuan dalam suatu wilayah, pemerintah dapat merancang program yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Distribusi penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Jambi tidak merata di setiap kecamatan. Beberapa kecamatan memiliki jumlah penduduk laki-laki yang lebih tinggi, sementara kecamatan lainnya memiliki jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kota Jambi tahun 2024
menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

| Kecamatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | L | P | |
| Telanaipura | 28.418 | 28.531 | 56.949 |
| Jambi Selatan | 29.268 | 29.365 | 58.633 |
| Jambi Timur | 33.602 | 33.089 | 66.691 |
| Pasar Jambi | 5.381 | 5.573 | 10.954 |
| Pelayangan | 7.018 | 6.796 | 13.814 |
| Danau Teluk | 6.923 | 6.717 | 13.640 |
| Kota Baru | 46.474 | 45.872 | 92.346 |
| Jelutung | 30.273 | 30.359 | 60.632 |
| Alam Barajo | 59.032 | 58.675 | 117.707 |
| Danau Sipin | 21.556 | 21.422 | 42.978 |
| Paal Merah | 58.232 | 56.989 | 115.312 |
| Total | 326.268 | 323.388 | 649.656 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 2025

B. Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Penduduk suatu negara atau wilayah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok umur. Klasifikasi ini sangat penting karena memberikan gambaran mengenai struktur penduduk dan beban ketergantungan dalam masyarakat.

Secara umum, penduduk dibagi menjadi tiga kelompok umur utama:

1. Kelompok umur 0–14 tahun, yang disebut kelompok usia muda. Mereka termasuk anak-anak dan remaja yang masih dalam tahap pendidikan dan belum produktif secara ekonomi. Kelompok ini membutuhkan perhatian besar, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak.
2. Kelompok umur 15–64 tahun, yang dikenal sebagai kelompok usia produktif. Penduduk dalam rentang usia ini dianggap memiliki kemampuan untuk bekerja, berkontribusi secara ekonomi, dan menjadi pilar pembangunan. Tingginya jumlah penduduk produktif dapat menjadi bonus demografi, yaitu kesempatan emas bagi suatu negara untuk tumbuh pesat secara ekonomi—jika didukung oleh kualitas pendidikan dan kesempatan kerja yang memadai.
3. Kelompok umur 65 tahun ke atas, disebut kelompok usia lanjut. Mereka umumnya sudah pensiun dan membutuhkan dukungan sosial serta pelayanan kesehatan yang lebih intensif. Seiring peningkatan harapan hidup, jumlah penduduk lansia pun semakin meningkat, sehingga menuntut perhatian lebih dari pemerintah dalam menciptakan sistem jaminan sosial dan kesehatan yang berkelanjutan.

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Kota Jambi tahun 2024 menurut kelompok usia dan jenis kelamin

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | L | P | |
| 00-04 | 24.149 | 22.597 | 46.746 |
| 05-09 | 29.119 | 26.989 | 56.108 |
| 10-14 | 30.008 | 28.026 | 58.034 |
| 15-19 | 26.428 | 25.433 | 51.861 |
| 20-24 | 27.587 | 26.320 | 53.907 |
| 25-29 | 25.799 | 25.632 | 51.431 |
| 30-34 | 24.836 | 24.720 | 49.556 |
| 35-39 | 24.529 | 24.744 | 49.273 |
| 40-44 | 25.284 | 26.380 | 51.664 |
| 45-49 | 23.317 | 23.566 | 46.883 |
| 50-54 | 19.773 | 20.259 | 40.032 |
| 55-59 | 15.929 | 16.825 | 32.754 |
| 60-64 | 12.232 | 12.751 | 24.983 |
| 65-69 | 8.484 | 8.929 | 17.413 |
| 70-74 | 4.863 | 5.250 | 10.113 |
| 75+ | 3.931 | 4.967 | 8.898 |
| Total | 326.268 | 323.388 | 649.656 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kota Jambi didominasi oleh anak-anak usia 05 – 14 tahun. Dengan tingginya persentase penduduk usia anak, maka kebijakan dan program- program pembangunan agar lebih

difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pembagian penduduk berdasarkan umur ini tidak hanya berfungsi sebagai data statistik. Ia menjadi cermin struktur sosial dan ekonomi suatu masyarakat, serta menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan—mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, hingga pelayanan kesehatan.

Dengan memahami struktur umur penduduk, kita dapat memperkirakan arah pembangunan ke depan, merencanakan anggaran yang lebih efisien, dan menciptakan masa depan yang lebih seimbang antara generasi muda, dewasa, dan lansia.

C. Penduduk Produktif

Penduduk produktif adalah kelompok usia yang berada dalam rentang 15 hingga 64 tahun. Kelompok ini dianggap sebagai tulang punggung pembangunan suatu negara, karena secara umum mereka memiliki kemampuan fisik, mental, dan keterampilan untuk bekerja, menciptakan inovasi, serta menopang kebutuhan ekonomi rumah tangga maupun negara.

Dalam dunia kependudukan, jumlah dan kualitas penduduk produktif sangat menentukan arah dan laju pertumbuhan sebuah bangsa. Ketika jumlah penduduk produktif jauh lebih besar dibandingkan kelompok usia non-produktif seperti anak-anak dan lansia, maka sebuah negara berpotensi mengalami bonus demografi. Ini adalah peluang emas yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan mempercepat pembangunan sosial.

Namun jumlah besar saja tidak cukup. Tantangan utama dari penduduk produktif adalah bagaimana mengelola mereka agar benar-benar produktif. Artinya, mereka harus memiliki akses terhadap pendidikan, pelatihan, lapangan kerja yang layak serta lingkungan yang mendukung kreativitas dan kewirausahaan.

Sebaliknya jika kelompok usia produktif tidak mendapatkan pekerjaan atau pendidikan yang layak, maka mereka bisa menjadi beban sosial yang justru memperbesar masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Oleh karena itu, investasi terhadap sumber daya manusia dalam kelompok usia produktif adalah investasi paling strategis bagi masa depan suatu negara. Karena di tangan merekalah masa depan dibentuk bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Penduduk Produktif di Kota Jambi tahun 2024 tercatat sebanyak 452.344 jiwa atau 69.63 persen dari jumlah penduduk Kota Jambi, penduduk belum produktif 160.888 jiwa atau 24.77 persen dari jumlah penduduk Kota Jambi. Sedangkan penduduk tidak Produktif sebanyak 36.424 jiwa atau 5.61 persen dari jumlah penduduk Kota Jambi.

BAB IV

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan yang berkeadilan, pendidikan bukan hanya sebatas sarana transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga instrumen penting dalam menghapuskan ketimpangan sosial, termasuk ketimpangan berbasis gender. Dibalik kemajuan infrastruktur dan kebijakan pendidikan, masih terdapat celah dan tantangan yang signifikan, khususnya dalam mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, partisipasi, dan keberhasilan pendidikan.

Data dari tahun 2024 menunjukkan bahwa anak usia sekolah dasar (7–12 tahun) di Kota Jambi telah hampir seluruhnya mengenyam pendidikan formal, dengan persentase partisipasi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Namun, ketimpangan mulai tampak pada jenjang pendidikan menengah dan atas. Semakin bertambahnya usia, peluang anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan seringkali terhambat oleh norma sosial yang masih memihak laki-laki. Dalam banyak kasus, terutama pada keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, prioritas pendidikan kerap diberikan kepada anak laki-laki dengan anggapan bahwa laki-laki lebih “layak” memperoleh kesempatan belajar lebih tinggi karena dianggap akan menjadi tulang punggung keluarga. Akibatnya, anak perempuan dihadapkan pada tekanan untuk berperan di ranah domestik, mulai dari membantu pekerjaan rumah tangga hingga menghadapi pernikahan usia dini yang mengakhiri proses pendidikan mereka sebelum waktunya.

Sistem sosial yang patriarki memainkan peran besar dalam pengambilan keputusan pendidikan anak. Budaya patriarki yang masih mengakar menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dan pengambil keputusan, sedangkan perempuan dianggap sebagai pihak yang “mengikuti” dan lebih sesuai untuk mengurus urusan rumah tangga. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai ini termanifestasi dalam bentuk pembatasan ruang gerak perempuan untuk bersekolah atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Tidak jarang ditemukan orang tua yang beranggapan bahwa terlalu tinggi pendidikan seorang anak perempuan dapat menyulitkan dalam pencarian jodoh atau dianggap “melawan kodrat”. Pandangan semacam ini, meskipun mulai bergeser, masih menjadi hambatan psikososial yang nyata dalam masyarakat.

Tidak hanya dari sisi keluarga, sistem pendidikan itu sendiri masih menyimpan bias gender secara struktural. Misalnya, representasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di dunia pendidikan masih sangat minim. Guru perempuan memang mendominasi pada jenjang pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar, tetapi jumlah mereka menurun drastis pada tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi, apalagi di posisi kepala sekolah, pengelola institusi, atau dosen di bidang eksakta dan teknologi. Ketimpangan ini diperkuat oleh kebijakan promosi dan pengembangan karier yang belum sepenuhnya berpihak dan ramah terhadap kebutuhan perempuan, seperti fleksibilitas waktu, dukungan pengasuhan, dan pelatihan kepemimpinan berbasis gender.

Tingkat pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan pun menunjukkan pola yang serupa. Laki-laki lebih banyak menyelesaikan pendidikan hingga diploma dan sarjana, sementara perempuan mayoritas berhenti pada jenjang

menengah. Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada potensi ekonomi individu perempuan, tetapi juga mempersempit ruang partisipasi mereka dalam dunia kerja formal, kepemimpinan publik, serta akses terhadap sumber daya produktif. Oleh karena itu, pendidikan sejatinya perlu dilihat sebagai jembatan yang mampu menghapus ketimpangan antar gender, dan bukan sekadar sebagai angka statistik yang bersifat agregat.

Di sisi lain, faktor-faktor lingkungan turut memperkuat kesenjangan ini. Minimnya fasilitas sekolah yang ramah gender, seperti toilet yang terpisah dan layak bagi anak perempuan, ruang laktasi bagi guru perempuan, serta pengamanan terhadap pelecehan seksual di sekolah merupakan persoalan nyata. Banyak anak perempuan yang harus bolos saat menstruasi karena tidak adanya fasilitas kebersihan yang memadai, dan tidak sedikit yang terpaksa keluar dari sekolah karena kehamilan yang tidak direncanakan, sering kali akibat hubungan yang tidak setara atau bahkan kekerasan berbasis gender. Ketiadaan mekanisme perlindungan dan konseling yang sensitif gender membuat sekolah belum menjadi ruang aman bagi semua peserta didik, terutama bagi anak perempuan.

Pemerintah Kota Jambi bersama berbagai pemangku kepentingan telah menginisiasi sejumlah langkah strategis guna memperkecil jurang ketimpangan gender dalam sektor pendidikan. Program seperti kampanye pencegahan pernikahan usia dini, fasilitasi pelatihan guru dalam menerapkan pendidikan yang responsif gender, serta penguatan literasi kesetaraan di lingkungan sekolah menjadi pijakan awal yang penting. Meski demikian, keberhasilan jangka panjang menuntut komitmen lintas sektor serta keberanian untuk mendorong perubahan

norma-norma sosial yang masih membatasi ruang gerak perempuan dalam dunia pendidikan.

Pendidikan gender perlu diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam kurikulum, bukan sekadar sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi dalam membentuk pola pikir kritis yang menjunjung nilai keadilan dan kesetaraan. Di samping itu, penting untuk mendorong penciptaan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung partisipasi perempuan secara setara melalui penyediaan fasilitas sekolah yang ramah perempuan, penguatan mekanisme perlindungan dari kekerasan berbasis gender, serta peningkatan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan pendidikan. Hanya melalui pendekatan menyeluruh dan transformatif inilah pendidikan dapat berfungsi sebagai kekuatan penggerak perubahan sosial menuju masyarakat Kota Jambi yang adil dan setara bagi semua.

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana penduduk usia sekolah terlibat dalam sistem pendidikan formal. Di Kota Jambi, data tahun 2025 menunjukkan bahwa APS pada jenjang pendidikan dasar (usia 7–12 tahun) telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dengan persentase di atas 98% untuk laki-laki maupun perempuan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dasar bagi semua anak, tanpa memandang jenis kelamin.

Namun, ketika memasuki jenjang pendidikan menengah (usia 13–15 tahun) dan atas (usia 16–18 tahun), tren partisipasi mulai menunjukkan

penurunan, terutama di kalangan anak perempuan. Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh norma sosial dan budaya yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Dalam beberapa kasus, anak perempuan diminta untuk membantu pekerjaan rumah tangga atau bahkan dinikahkan dini, sementara anak laki-laki tetap didorong untuk melanjutkan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan secara formal terbuka, hambatan kultural dan struktural masih menjadi tantangan nyata dalam mewujudkan kesetaraan partisipasi.

Ketimpangan APS juga terlihat lebih tajam di wilayah pinggiran kota dan kawasan dengan tingkat kesejahteraan rendah. Di daerah-daerah tersebut, anak perempuan lebih rentan mengalami putus sekolah karena kombinasi antara keterbatasan fasilitas pendidikan, jarak tempuh yang jauh, serta minimnya dukungan keluarga. Selain itu, kurangnya fasilitas sekolah yang ramah gender, seperti sanitasi layak dan ruang aman, turut memperburuk situasi. Anak perempuan yang mengalami menstruasi, misalnya, sering kali absen karena tidak tersedia fasilitas kebersihan yang memadai, yang pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan partisipasi mereka dalam pendidikan.

Pemerintah Kota Jambi telah berupaya meningkatkan APS melalui berbagai program, seperti penyuluhan pendidikan keluarga, penguatan peran sekolah dalam pencegahan pernikahan dini, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam kampanye pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Meskipun demikian, untuk mencapai partisipasi yang benar-benar setara, diperlukan

pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penyediaan akses, tetapi juga pada transformasi nilai sosial yang mendasari ketimpangan tersebut. Pendidikan harus diposisikan sebagai hak dasar yang tidak boleh dikompromikan oleh konstruksi gender, dan APS harus menjadi cerminan dari sistem yang adil, inklusif, dan berpihak pada semua anak.

Tabel 4.1
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Penduduk Kota Jambi Tahun 2024

| Indikator | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 23 |
|------------|--------|---------|---------|---------|
| Kota Jambi | 99.27 | 98.63 | 81.76 | 49.06 |

Sumber : BPS Kota Jambi tahun 2025

B. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang menggambarkan proporsi penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Berbeda dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang bersifat lebih umum, APM memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai efisiensi sistem pendidikan dalam menjangkau kelompok usia ideal. Di Kota Jambi, data tahun 2025 menunjukkan bahwa APM pada jenjang pendidikan dasar (SD/ sederajat) telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dengan capaian di atas 95% baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini mencerminkan keberhasilan program wajib belajar dan pemerataan akses pendidikan dasar di seluruh wilayah kota.

Namun, ketika memasuki jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/ sederajat), APM mulai menunjukkan penurunan, terutama di kalangan

anak perempuan. Penurunan ini semakin tajam pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA/ sederajat), di mana APM perempuan tercatat lebih rendah dibandingkan laki-laki. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun akses fisik terhadap sekolah tersedia, terdapat hambatan sosial dan kultural yang menghalangi keberlanjutan pendidikan anak perempuan pada jenjang yang lebih tinggi. Di antaranya adalah tekanan untuk menikah muda, beban kerja domestik, serta persepsi bahwa pendidikan tinggi tidak terlalu penting bagi perempuan.

Ketimpangan APM juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan ekonomi. Di wilayah pinggiran kota dan kawasan dengan tingkat kesejahteraan rendah, APM perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah pusat kota. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan beririsan dengan ketimpangan spasial dan ekonomi. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung seperti transportasi aman, sanitasi layak, dan ruang belajar yang inklusif turut memperbesar risiko anak perempuan untuk tidak melanjutkan pendidikan sesuai jenjang usianya.

Pemerintah Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan APM, termasuk melalui penguatan peran sekolah dalam mendeteksi dini risiko putus sekolah, pelibatan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak, serta penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Namun, untuk mencapai APM yang benar-benar setara antara laki-laki dan perempuan, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada aspek

kuantitatif, tetapi juga pada transformasi nilai sosial yang mendasari ketimpangan tersebut. APM yang tinggi dan merata bukan hanya mencerminkan keberhasilan sistem pendidikan, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan gender di Kota Jambi.

Tabel 4.2
Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kota Jambi
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2024

| Indikator | SD | SMP | SMA | PT |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Kota Jambi | 97.83 | 71.71 | 73.97 | 43.56 |

Sumber : BPS Kota Jambi tahun 2025

C. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator penting dalam mengukur keterjangkauan sistem pendidikan terhadap seluruh penduduk, tanpa membatasi pada kelompok usia ideal. APK mencerminkan proporsi seluruh peserta didik pada suatu jenjang pendidikan tertentu baik yang berada dalam usia sekolah maupun yang lebih tua dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia ideal untuk jenjang tersebut. Di Kota Jambi, data tahun 2024 menunjukkan bahwa APK pada jenjang pendidikan dasar (SD/ sederajat) telah mencapai angka yang sangat tinggi, bahkan melebihi 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya anak-anak usia sekolah dasar yang mengikuti pendidikan, tetapi juga terdapat peserta didik yang berusia lebih tua, misalnya karena keterlambatan masuk sekolah atau pengulangan kelas.

Pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/ sederajat), APK mulai menunjukkan penurunan, meskipun masih berada pada kisaran yang cukup baik. Penurunan ini menjadi lebih signifikan pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA/ sederajat), terutama di kalangan perempuan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar tantangan yang dihadapi oleh anak perempuan untuk tetap bertahan dalam sistem pendidikan. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kultural, seperti tekanan untuk menikah muda, beban kerja domestik, serta persepsi bahwa pendidikan tinggi tidak terlalu relevan bagi perempuan.

APK yang tinggi pada jenjang dasar dan menengah pertama menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Kota Jambi telah berhasil menjangkau sebagian besar penduduk usia sekolah dan bahkan melampaui batas usia ideal. Namun, APK yang menurun pada jenjang menengah atas menandakan adanya kebutuhan untuk memperkuat keberlanjutan pendidikan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah atau yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Ketimpangan ini juga menunjukkan bahwa meskipun akses fisik terhadap sekolah tersedia, belum semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Untuk itu, Pemerintah Kota Jambi perlu terus memperkuat intervensi yang bersifat afirmatif dan transformatif. Upaya seperti penyediaan fasilitas pendidikan yang inklusif, penguatan peran sekolah dalam mencegah putus sekolah, serta pelibatan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak menjadi langkah penting. Selain itu, penting pula untuk

mengintegrasikan pendekatan berbasis gender dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan, agar APK tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi juga cerminan dari sistem pendidikan yang adil, setara, dan menjangkau semua kelompok masyarakat.

Tabel 4.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Kota Jambi
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2024

| Jenis Kelamin | SD | SMP | SMA | PT |
|---------------|--------|-------|--------|-------|
| Kota Jambi | 108.22 | 75.73 | 102.97 | 62.47 |

Sumber : BPS Kota Jambi tahun 2025

D. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator fundamental dalam menilai keberhasilan sistem pendidikan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kemampuan membaca dan menulis bukan hanya menjadi prasyarat untuk mengakses informasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Di Kota Jambi, data tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas telah mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu sekitar 99,90%. Capaian ini menempatkan Kota Jambi sejajar dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia dalam hal literasi dasar.

Namun, di balik angka yang impresif tersebut, masih terdapat ketimpangan yang perlu dicermati lebih dalam. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, perempuan usia dewasa dan lanjut usia cenderung memiliki tingkat melek huruf yang sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Hal ini merupakan warisan dari ketimpangan akses pendidikan di masa lalu, ketika anak perempuan lebih sering dikorbankan dalam keputusan pendidikan keluarga. Meskipun kesenjangan ini semakin mengecil di generasi muda, jejak ketimpangan historis tersebut masih terasa dalam struktur sosial dan ekonomi saat ini.

Selain itu, tingkat melek huruf yang tinggi belum tentu mencerminkan kualitas literasi yang fungsional. Banyak individu yang secara teknis mampu membaca dan menulis, tetapi belum memiliki kemampuan literasi kritis yang dibutuhkan untuk memahami informasi kompleks, mengakses layanan publik, atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks gender, perempuan yang memiliki tingkat pendidikan rendah lebih rentan terhadap informasi yang menyesatkan, kekerasan berbasis gender, dan keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar.

Pemerintah Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat, termasuk melalui program keaksaraan fungsional, pelatihan keterampilan berbasis komunitas, dan penyediaan bahan bacaan yang inklusif. Namun, untuk memastikan bahwa angka melek huruf benar-benar mencerminkan pemberdayaan, perlu ada pendekatan yang lebih transformatif—yang tidak hanya menargetkan kemampuan teknis, tetapi juga membangun kesadaran kritis, kepercayaan diri, dan partisipasi aktif, terutama di kalangan perempuan dewasa dan kelompok rentan lainnya.

Tabel 4.4

Persentase Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk
Kota Jambi tahun 2024 Usia diatas 15 tahun

| Jenis Kelamin | Huruf Latin | Huruf Lainnya |
|-------------------|--------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Laki-laki | 99.76 | 27.39 |
| Perempuan | 99.50 | 29.52 |
| Kota Jambi | 99.63 | 28.48 |

Sumber : BPS Kota Jambi tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa AMH Kota Jambi sangat tinggi hampir mencapai 100 persen. Angka persentase ini cukup signifikan dan lebih tinggi dibanding rata-rata pencapaian AMH Nasional. Persentase penduduk yang melek huruf laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, walaupun perbedaannya tidak begitu signifikan.

Semakin tinggi Angka Melek Huruf perempuan, berarti akan semakin meningkat dan terbukanya peluang bagi perempuan untuk memperoleh wawasan, informasi dan pengetahuan yang lebih luas, sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah perempuan yang berkualitas. Berbagai program telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengurangi bahkan menghilangkan penduduk.

E. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan indikator krusial dalam menilai keberhasilan sistem pendidikan dalam mempertahankan peserta didik hingga menyelesaikan jenjang pendidikan yang semestinya. Di Kota Jambi, meskipun akses terhadap pendidikan dasar dan menengah telah mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir, fenomena putus sekolah masih menjadi tantangan nyata, terutama di jenjang pendidikan menengah atas. Data nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang SLTA masih berada di atas 20 persen, dan meskipun data spesifik Kota Jambi belum dirinci secara terbuka, kecenderungan ini juga tercermin di tingkat lokal, terutama di wilayah pinggiran dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Faktor penyebab putus sekolah bersifat multidimensi dan saling berkaitan. Di satu sisi, faktor ekonomi seperti ketidakmampuan keluarga membiayai kebutuhan sekolah, kebutuhan untuk bekerja membantu orang tua, atau keterbatasan transportasi menjadi alasan utama. Di sisi lain, faktor sosial dan budaya memainkan peran yang tidak kalah besar. Anak perempuan, misalnya, lebih rentan mengalami putus sekolah akibat tekanan untuk menikah muda, beban kerja domestik yang tinggi, serta norma sosial yang masih memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-laki. Dalam beberapa kasus, kehamilan remaja dan kurangnya dukungan psikososial dari lingkungan sekolah juga menjadi pemicu berhentinya anak dari bangku pendidikan.

Selain itu, lingkungan belajar yang tidak inklusif dan kurang ramah gender turut memperbesar risiko putus sekolah, terutama bagi anak perempuan. Minimnya fasilitas sanitasi yang layak, tidak adanya ruang aman untuk berkonsultasi, serta kurangnya representasi perempuan dalam tenaga pendidik dan pengambil kebijakan di sekolah membuat banyak anak merasa tidak nyaman atau tidak didukung untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa putus sekolah bukan hanya persoalan individu atau keluarga, tetapi juga cerminan dari sistem pendidikan yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam.

Pemerintah Kota Jambi telah mulai merespons persoalan ini melalui berbagai program, seperti penguatan peran guru Bimbingan Konseling (BK), pelibatan masyarakat dalam pemantauan anak berisiko putus sekolah, serta kampanye pencegahan pernikahan usia dini. Namun, untuk menurunkan angka putus sekolah secara signifikan, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan lintas sektor. Intervensi harus mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kultural, serta memastikan bahwa setiap anak terutama anak perempuan dari kelompok rentan—memiliki dukungan yang cukup untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang tertinggi sesuai potensinya.

Lebih jauh, angka putus sekolah juga berimplikasi langsung terhadap siklus kemiskinan antargenerasi. Ketika seorang anak terutama Perempuan berhenti sekolah sebelum menuntaskan jenjang pendidikan menengah, peluang mereka untuk mengakses pekerjaan layak, berpendapatan stabil, dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan keluarga dan komunitas menjadi sangat terbatas. Dalam jangka panjang, ketimpangan pendidikan ini

bukan hanya mempersempit kesempatan individu, tetapi juga menurunkan daya saing daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, menurunkan angka putus sekolah bukan sekadar tugas sektor pendidikan, melainkan tanggung jawab kolektif lintas sektor untuk memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dalam lingkungan belajar yang memberdayakan, mendukung, dan membebaskan dari belenggu diskriminasi sosial.

Tabel 4.5
Angka Putus Sekolah di Kota Jambi Tahun 2024

| Jenis Kelamin | SD | SMP | JUMLAH |
|---------------|----|-----|--------|
| Laki-laki | 1 | - | 1 |
| Perempuan | - | - | 33 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi tahun 2025

F. Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas sistem pendidikan dalam mengantarkan peserta didik menyelesaikan jenjang pendidikan secara tuntas. Di Kota Jambi, data tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kelulusan pada jenjang pendidikan dasar (SD/ sederajat) dan menengah pertama (SMP/ sederajat) telah mencapai angka yang sangat tinggi, mendekati 100 persen. Capaian ini mencerminkan keberhasilan program wajib belajar serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dasar sebagai fondasi masa depan anak.

Namun demikian, pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA/ sederajat), angka kelulusan menunjukkan kecenderungan yang lebih fluktuatif, terutama di kalangan peserta didik perempuan. Beberapa faktor yang memengaruhi hal ini antara lain adalah tekanan sosial untuk menikah muda, beban kerja domestik yang tidak seimbang, serta keterbatasan dukungan psikososial di lingkungan sekolah. Selain itu, anak perempuan yang mengalami kehamilan remaja atau kekerasan berbasis gender sering kali tidak mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang memadai, sehingga terpaksa menghentikan pendidikannya sebelum lulus.

Ketimpangan angka kelulusan juga dapat ditelusuri dari aspek geografis dan ekonomi. Di wilayah pinggiran kota atau daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah, angka kelulusan cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah pusat kota. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan menyelesaikan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh dukungan lingkungan sosial, ekonomi, dan kultural yang memungkinkan anak bertahan hingga akhir jenjang pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Jambi perlu terus memperkuat sistem pendeteksian dini terhadap risiko tidak lulus, memperluas layanan konseling yang sensitif gender, serta memastikan bahwa setiap sekolah memiliki mekanisme dukungan yang mampu mencegah anak terutama Perempuan gugur dari proses pendidikan menjelang kelulusan. Angka kelulusan yang tinggi dan merata bukan hanya mencerminkan keberhasilan sistem pendidikan, tetapi juga menjadi cerminan dari komitmen kolektif dalam menjamin hak setiap anak untuk menyelesaikan pendidikan secara bermartabat dan setara.

Lebih jauh, angka kelulusan yang tinggi harus dipandang tidak semata sebagai pencapaian administratif, tetapi sebagai refleksi dari kualitas dan keberdayaan proses pendidikan itu sendiri. Ketika kelulusan didorong bukan hanya oleh kemampuan akademik, melainkan juga oleh dukungan emosional, lingkungan belajar yang aman, serta penghormatan terhadap hak dan martabat peserta didik—khususnya Perempuan maka pendidikan akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga tangguh dan berdaya. Oleh karena itu, peningkatan angka kelulusan harus diiringi dengan komitmen untuk menjadikan setiap sekolah sebagai ruang tumbuh yang adil, setara, dan bebas dari bias gender, agar keberhasilan akademik benar-benar mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Tabel 4.6

Angka Kelulusan di Kota Jambi menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2024

| Jenis Kelamin | SD | SMP |
|---------------|-------|-------|
| Laki-laki | 5.161 | 4.317 |
| Perempuan | 4.922 | 4.121 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi tahun 2025

BAB V**KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

Kesehatan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu dan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang produktif, sejahtera, dan berdaya. Dalam konteks pembangunan yang berperspektif gender, layanan kesehatan yang adil, merata, dan responsif terhadap kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu daerah dalam menjamin kesejahteraan warganya. Pemerintah Kota Jambi menyadari bahwa kesehatan bukan hanya urusan medis, tetapi juga berkaitan erat dengan keadilan sosial, akses terhadap informasi, dan kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan yang berdampak pada kualitas hidup mereka.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Jambi menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui berbagai inovasi strategis. Salah satu terobosan unggulan adalah hadirnya Call Center Bahagia 112 dan Public Safety Center (PSC) 119, layanan kegawatdaruratan terpadu yang beroperasi 24 jam secara gratis. Layanan ini memungkinkan masyarakat mendapatkan pertolongan cepat dalam situasi darurat medis maupun nonmedis, hanya dengan satu panggilan. Dikelola oleh UPTD Command Center Bahagia 112 Dinas Kesehatan Kota Jambi, sistem ini telah dilengkapi dengan tenaga kesehatan terlatih, armada ambulans siaga, sistem komunikasi digital, serta integrasi lintas instansi seperti kepolisian, dinas sosial, dan pemadam kebakaran. Kehadiran layanan ini tidak hanya

meningkatkan respons kegawatdaruratan, tetapi juga menjadi simbol dari kesiapsiagaan kota dalam melindungi warganya secara menyeluruh.

Selain layanan darurat, Pemerintah Kota Jambi juga melaksanakan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) secara masif dengan sistem jemput bola. Program ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan wilayah pinggiran, dengan target lebih dari 640.000 jiwa. Data menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling aktif memanfaatkan layanan ini, mencerminkan meningkatnya kesadaran perempuan terhadap pentingnya deteksi dini dan perawatan kesehatan preventif. Program PKG tidak hanya berfungsi sebagai layanan medis, tetapi juga sebagai sarana edukasi kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

Upaya peningkatan layanan kesehatan juga dilakukan melalui penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia. Pemerintah Kota Jambi mengusulkan penambahan jumlah puskesmas, peningkatan kapasitas rumah sakit daerah, serta pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Salah satu inovasi penting adalah Kartu Bahagia, sebuah sistem berbasis data tunggal yang menghubungkan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial dalam satu platform. Program ini memungkinkan identifikasi cepat terhadap warga yang membutuhkan intervensi, serta mempercepat distribusi layanan secara tepat sasaran.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan masih dirasakan oleh kelompok perempuan, terutama di wilayah pinggiran dan komunitas dengan tingkat pendidikan rendah. Masih terdapat hambatan struktural seperti keterbatasan transportasi, minimnya

tenaga kesehatan perempuan di fasilitas tertentu, serta kurangnya layanan kesehatan reproduksi yang ramah dan sensitif gender. Selain itu, beban ganda yang dihadapi Perempuan sebagai pengasuh utama keluarga sekaligus pencari nafkah membuat mereka sering menunda atau mengabaikan kebutuhan kesehatannya sendiri.

Oleh karena itu, pendekatan kesehatan yang berkeadilan gender harus terus diperkuat. Ini mencakup penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, pelatihan tenaga kesehatan tentang kesetaraan gender, serta penyusunan kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki di setiap tahap kehidupan. Pemerintah Kota Jambi juga perlu memperluas kampanye literasi kesehatan, terutama di kalangan perempuan dewasa dan lansia, agar mereka memiliki pengetahuan dan keberdayaan untuk mengambil keputusan yang berdampak pada kesejahteraan diri dan keluarganya.

Dengan berbagai inovasi dan komitmen yang telah ditunjukkan, Kota Jambi berada pada jalur yang tepat untuk menjadi kota yang sehat, tangguh, dan inklusif. Namun, keberhasilan jangka panjang hanya dapat dicapai jika seluruh elemen masyarakat, pemerintah, tenaga kesehatan, komunitas, dan individu bekerja bersama dalam membangun sistem kesehatan yang tidak hanya melayani, tetapi juga memberdayakan.

Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Jambi telah mengalami evolusi paradigma yang signifikan, dari sekadar upaya pengendalian jumlah kelahiran menjadi strategi pembangunan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berdaya. Dalam konteks pembangunan yang berperspektif gender, KB tidak hanya

menyasar aspek reproduksi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, memperkuat peran laki-laki dalam pengasuhan, serta menciptakan kesetaraan dalam pengambilan keputusan keluarga. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) terus memperkuat layanan KB dengan pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis komunitas.

Pada tahun 2025, salah satu langkah strategis yang menonjol adalah pelaksanaan Pelayanan KB Serentak yang digelar di berbagai titik strategis, seperti perusahaan, pusat perbelanjaan, dan fasilitas kesehatan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 9 Mei 2025 di sembilan titik, termasuk Perumda Air Minum Tirta Mayang, Ramayana WTC, dan PT Lingga Harapan Arthess, serta enam perusahaan lainnya yang diarahkan ke puskesmas terdekat. Program ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga menegaskan bahwa KB adalah hak semua warga, tanpa diskriminasi status sosial atau lokasi geografis. Masyarakat cukup membawa KTP untuk mendapatkan layanan, yang disediakan secara gratis dan ramah.

Pelayanan KB kini tidak lagi bersifat top-down, melainkan berbasis edukasi dan pemberdayaan. Kader KB, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan dilibatkan secara aktif untuk memberikan pemahaman yang benar tentang manfaat KB, menghapus stigma yang masih melekat, serta mendorong keterlibatan laki-laki dalam pengambilan keputusan reproduksi. Edukasi ini penting untuk mengubah persepsi bahwa KB adalah larangan memiliki anak, padahal sejatinya KB bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran agar kesehatan

ibu dan anak terjaga, serta agar keluarga dapat merencanakan masa depan dengan lebih baik.

Program KB di Kota Jambi juga terintegrasi dengan upaya penurunan stunting dan peningkatan gizi keluarga. Melalui pendekatan holistik, KB menjadi bagian dari ekosistem pembangunan keluarga yang tidak hanya fokus pada jumlah anak, tetapi juga pada kualitas tumbuh kembang mereka. Salah satu contohnya adalah penyaluran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 285 balita berisiko stunting, yang dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun 2025. Upaya ini menunjukkan bahwa KB bukan hanya urusan kesehatan reproduksi, tetapi juga berkaitan erat dengan kesejahteraan generasi masa depan.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat KB, terutama di wilayah pinggiran dan komunitas dengan tingkat pendidikan rendah. Keterbatasan akses terhadap alat kontrasepsi modern, kurangnya tenaga penyuluh yang terlatih, serta minimnya keterlibatan laki-laki dalam program KB menjadi hambatan yang perlu diatasi secara sistematis. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih progresif, seperti penyediaan layanan KB mobile, pelatihan kader laki-laki sebagai agen perubahan, serta kampanye publik yang menekankan bahwa perencanaan keluarga adalah tanggung jawab bersama.

Dengan pendekatan yang lebih adil, transformatif, dan berbasis hak, program KB di Kota Jambi diharapkan tidak hanya menurunkan angka kelahiran, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas

hidup perempuan, dan mempercepat tercapainya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari.

A. Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah menjadi fondasi utama dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk masyarakat Kota Jambi. Dalam konteks pembangunan yang responsif gender, JKN memainkan peran strategis dalam memperkecil kesenjangan akses layanan kesehatan antara laki-laki dan perempuan.

Di Kota Jambi, cakupan kepesertaan JKN pada tahun 2025 menunjukkan tren positif, dengan lebih dari 60 persen penduduk tercatat sebagai peserta aktif. Dari jumlah tersebut, proporsi perempuan peserta JKN sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, terutama pada kelompok usia produktif. Hal ini mencerminkan kebutuhan perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, serta program keluarga berencana.

Pemanfaatan layanan JKN juga memperlihatkan pola yang berbeda berdasarkan jenis kelamin. Perempuan lebih sering mengakses layanan primer seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi anak, dan kontrasepsi, sementara laki-laki cenderung memanfaatkan layanan untuk penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Namun demikian, tantangan masih ada, terutama bagi perempuan kepala keluarga, pekerja informal, dan kelompok rentan lainnya yang menghadapi hambatan administratif maupun keterbatasan informasi.

JKN juga mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) melalui pembiayaan layanan kontrasepsi dasar seperti IUD, implan, suntik, dan pil KB. Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Kota Jambi telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menyediakan layanan KB yang ramah gender. Meski demikian, partisipasi laki-laki dalam program KB masih tergolong rendah, sehingga diperlukan pendekatan edukatif yang lebih inklusif dan sensitif gender.

Secara keseluruhan, keberadaan JKN telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki di Kota Jambi. Namun, untuk mencapai kesetaraan yang lebih menyeluruh, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk peningkatan literasi kesehatan, penguatan layanan berbasis komunitas, serta kebijakan afirmatif yang mendukung kelompok rentan.

Tabel 5.1

Penduduk Kota Jambi yang mempunyai keluhan Kesehatan dalam sebulan terakhir dan rawat Jalan Yang menggunakan Jaminan Kesehatan Tahun 2024

| Jenis Kelamin | Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan |
|-------------------|---|
| Laki-laki | 65.24 |
| Perempuan | 71.24 |
| Kota Jambi | 68.61 |

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi tahun 2024

B. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas kesehatan masyarakat dan keberhasilan pembangunan sosial di suatu wilayah. AHH menggambarkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola kematian saat ini akan tetap berlaku sepanjang hidupnya. Di Kota Jambi, AHH tidak hanya mencerminkan kondisi kesehatan fisik penduduk, tetapi juga menjadi cerminan dari akses terhadap layanan kesehatan, kualitas lingkungan hidup, tingkat pendidikan, serta perlindungan sosial yang tersedia bagi masyarakat.

Namun demikian, angka harapan hidup yang lebih tinggi pada perempuan tidak serta-merta mencerminkan kualitas hidup yang lebih baik. Banyak perempuan, terutama yang berada dalam kelompok usia lanjut, masih menghadapi tantangan berupa beban ganda sebagai pengasuh keluarga dan pencari nafkah, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan lansia, serta minimnya perlindungan sosial. Selain itu, perempuan pekerja informal sering kali tidak memiliki jaminan kesehatan atau pensiun, yang berdampak pada kualitas hidup mereka di usia tua. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada peningkatan angka harapan hidup secara kuantitatif, tetapi juga memastikan bahwa tahun-tahun tambahan tersebut diisi dengan kehidupan yang sehat, produktif, dan bermartabat.

Upaya peningkatan AHH di Kota Jambi perlu diarahkan pada penguatan layanan kesehatan primer yang responsif gender, peningkatan literasi kesehatan masyarakat, serta penyediaan layanan lansia yang inklusif dan terjangkau. Selain itu, promosi gaya hidup sehat, pengendalian penyakit tidak

menular, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup juga menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan AHH. Pemerintah Kota Jambi juga diharapkan dapat mengembangkan kebijakan afirmatif yang mendukung kelompok rentan, termasuk perempuan lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan pendekatan yang holistik dan berkeadilan gender, peningkatan angka harapan hidup di Kota Jambi tidak hanya akan menjadi indikator statistik semata, tetapi juga menjadi refleksi dari komitmen bersama untuk menciptakan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan inklusif bagi semua.

Tabel 5.2
Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk
Kota Jambi Tahun 2024

| No | Daerah | Umur Harapan Hidup (UHH) | | |
|----|----------------|--------------------------|-------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Kota Jambi | 72.99 | 74.85 | 75.12 |
| 2. | Provinsi Jambi | 71.50 | 73.84 | 74.29 |

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi tahun 2024 (BPS Provinsi Jambi)

C. Penderita HIV/ AIDS

HIV/AIDS masih menjadi isu kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius di Kota Jambi, terutama dalam konteks kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga membawa konsekuensi sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks bagi penderita dan keluarganya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Jambi

pada tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan, dengan mayoritas kasus terjadi pada kelompok usia produktif, yakni 25 hingga 49 tahun. Laki-laki masih mendominasi jumlah kasus, namun peningkatan kasus pada perempuan juga mulai terlihat, khususnya di kalangan ibu rumah tangga yang tertular dari pasangan mereka. Fenomena ini menegaskan bahwa perempuan sering kali menjadi korban sekunder dari perilaku berisiko yang dilakukan oleh pasangan laki-laki, dan memperkuat urgensi pendekatan berbasis gender dalam strategi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Di sisi layanan, Kota Jambi telah memiliki sejumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan konseling dan tes sukarela (VCT), serta pengobatan antiretroviral (ARV). Namun, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam bentuk stigma sosial, kurangnya literasi kesehatan, dan keterbatasan akses terhadap layanan, khususnya bagi perempuan dari kelompok ekonomi rendah atau pekerja informal. Banyak perempuan enggan melakukan tes HIV karena takut dikucilkan atau kehilangan dukungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan HIV/AIDS tidak cukup hanya dengan pendekatan medis, tetapi juga memerlukan intervensi sosial dan budaya yang lebih mendalam.

Pemerintah Kota Jambi perlu memperkuat upaya edukasi publik yang inklusif dan sensitif gender, memperluas akses layanan VCT dan ARV yang ramah perempuan, serta melibatkan komunitas dan organisasi masyarakat sipil dalam mendampingi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA juga menjadi kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan kualitas hidup yang

lebih baik. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis hak asasi manusia, Kota Jambi diharapkan mampu menekan laju penyebaran HIV/AIDS sekaligus memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki akses yang setara terhadap layanan pencegahan, pengobatan, dan pendampingan.

Tabel 5.3

Jumlah Penderita HIV/ AIDS di Kota Jambi Tahun 2024

| No | Daerah | Jenis Kelamin | | |
|----|------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. | Kota Jambi | 169 | 32 | 201 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2025

D. Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi utama dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat dan penguatan ketahanan keluarga. Di Kota Jambi, pelaksanaan program KB tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui perencanaan jumlah dan jarak kelahiran yang ideal. Dalam konteks kesetaraan gender, program KB memiliki peran penting dalam memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi mereka, sekaligus mendorong keterlibatan laki-laki dalam perencanaan keluarga.

Pada tahun 2024, cakupan peserta aktif KB di Kota Jambi menunjukkan tren yang cukup stabil, dengan dominasi penggunaan metode kontrasepsi

jangka pendek seperti suntik dan pil, terutama di kalangan perempuan usia subur. Sementara itu, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implan masih relatif rendah, meskipun telah tersedia di sebagian besar fasilitas kesehatan tingkat pertama. Partisipasi laki-laki dalam program KB, baik melalui penggunaan kondom maupun vasektomi, masih tergolong rendah, yang menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang lebih inklusif dan berbasis kesetaraan peran dalam rumah tangga.

Faktor sosial dan budaya masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program KB di Kota Jambi. Persepsi bahwa KB adalah tanggung jawab perempuan semata masih cukup kuat, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Selain itu, perempuan pekerja informal dan kelompok rentan lainnya sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan KB, baik karena keterbatasan waktu, informasi, maupun biaya tidak langsung seperti transportasi dan kehilangan pendapatan harian.

Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan KB, termasuk melalui penyuluhan berbasis komunitas, pelatihan kader, serta integrasi layanan KB dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan sinergi lintas sektor, peningkatan literasi kesehatan reproduksi, serta penguatan peran laki-laki sebagai mitra sejajar dalam pengambilan keputusan keluarga.

Dengan pendekatan yang responsif gender dan berbasis hak, program KB diharapkan tidak hanya mampu menekan angka kelahiran, tetapi juga menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan setara di Kota Jambi.

Tabel 5.4
Jumlah Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kota Jambi
Berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi tahun 2024

| No | Jenis Kelamin | Jenis Alat Kontrasepsi | | | | | | |
|----|---------------|------------------------|-------|-----|--------|---------|----------|--------|
| | | IUD | MOW | MOP | Kondom | Implant | Suntikan | Pil |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Perempuan | 4.595 | 2.543 | - | - | 3.652 | 40.255 | 14.236 |
| 2. | Laki-laki | - | - | 67 | 6.060 | - | - | - |

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi tahun 2025

Tabel 5.5
Jumlah penyuluh KB di Kota Jambi menurut Kecamatan
dan jenis kelamin Tahun 2024

| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|---------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Telanaipura | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Jambi Selatan | 0 | 3 | 3 |
| 3. | Jambi Timur | 2 | 2 | 4 |
| 4. | Pasar Jambi | 0 | 2 | 2 |
| 5. | Pelayangan | 2 | 2 | 4 |

| | | | | |
|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 6. | Danau Teluk | 1 | 1 | 2 |
| 7. | Kota Baru | 1 | 3 | 4 |
| 8. | Jelutung | 0 | 3 | 3 |
| 9. | Alam Barajo | 1 | 2 | 3 |
| 10. | Danau Sipin | 0 | 3 | 3 |
| 11. | Paal Merah | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | | 9 | 24 | 33 |

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi tahun 2025

Tabel 5.6

Jumlah kader KB di Kota Jambi menurut Kecamatan
dan jenis kelamin Tahun 2024

| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Telanaipura | - | 65 | 65 |
| 2. | Jambi Selatan | - | 74 | 74 |
| 3. | Jambi Timur | - | 96 | 96 |
| 4. | Pasar Jambi | - | 34 | 34 |
| 5. | Pelayangan | - | 33 | 33 |
| 6. | Danau Teluk | - | 32 | 32 |
| 7. | Kota Baru | - | 76 | 76 |
| 8. | Jelutung | - | 107 | 107 |
| 9. | Alam Barajo | - | 94 | 94 |
| 10. | Danau Sipin | - | 66 | 66 |
| 11. | Paal Merah | - | 68 | 68 |
| Jumlah | | | | 745 |

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi tahun 2025

E. Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama merupakan indikator penting dalam menilai dinamika sosial dan kesehatan reproduksi masyarakat, serta mencerminkan tingkat kesadaran akan hak-hak perempuan dan laki-laki dalam menentukan waktu yang tepat untuk membentuk keluarga. Di Kota Jambi, tren usia perkawinan pertama menunjukkan pergeseran yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari BPS Kota Jambi, rata-rata usia perkawinan pertama perempuan masih berada di bawah laki-laki, dengan selisih yang cukup signifikan. Perempuan umumnya menikah pada usia 20–22 tahun, sementara laki-laki cenderung menikah pada usia 24–26 tahun. Meskipun angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dekade sebelumnya, masih terdapat tantangan dalam mencegah perkawinan usia dini, terutama di kalangan masyarakat berpendidikan rendah dan berpenghasilan menengah ke bawah.

Perkawinan pada usia yang terlalu muda berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi perempuan, meningkatkan kemungkinan komplikasi kehamilan dan persalinan, serta berdampak pada putusnya pendidikan dan terbatasnya peluang ekonomi. Selain itu, perempuan yang menikah di usia dini cenderung memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga, termasuk dalam hal kesehatan, pendidikan anak, dan perencanaan keluarga. Oleh karena itu, peningkatan usia perkawinan pertama menjadi salah satu strategi penting dalam upaya pemberdayaan perempuan dan penguatan ketahanan keluarga.

Pemerintah Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perkawinan usia dini, antara lain melalui kampanye edukasi kesehatan reproduksi di sekolah, pelibatan tokoh masyarakat dan agama dalam penyuluhan, serta penguatan regulasi yang melindungi hak anak dan remaja. Namun, perubahan sosial yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi bagi perempuan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penciptaan ruang dialog yang aman bagi remaja untuk memahami pentingnya perencanaan masa depan.

Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis hak, peningkatan usia perkawinan pertama diharapkan tidak hanya menjadi indikator statistik, tetapi juga mencerminkan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih setara, sehat, dan berdaya di Kota Jambi.

Tabel 5.7

Perkawinan Usia Anak di Kota Jambi menurut umur tahun 2024

| No. | Umur Anak | Jumlah (anak) |
|-----|-----------|---------------|
| 1. | 15 Tahun | 1 |
| 2. | 16 Tahun | 2 |
| 3. | 17 Tahun | 8 |
| 4. | 18 Tahun | 25 |

Sumber : Pengadilan Agama Kota Jambi tahun 2025

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang tidak hanya berfungsi sebagai penggerak roda ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam pengertian yuridis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Definisi ini mencakup hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta berbagai aspek yang mengatur kondisi kerja, perlindungan sosial, dan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh.

Namun, dalam praktiknya, ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, budaya, dan politik yang membentuk struktur masyarakat. Ketenagakerjaan bukan sekadar soal tersedianya lapangan kerja, tetapi juga menyangkut kualitas pekerjaan, kesetaraan akses, perlindungan hak-hak pekerja, dan pengakuan terhadap kontribusi kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja informal. Oleh karena itu, pendekatan terhadap isu ketenagakerjaan harus bersifat holistik dan interseksional, dengan mempertimbangkan berbagai dimensi yang saling berkelindan, seperti gender, kelas sosial, pendidikan, dan lokasi geografis.

Dalam konteks global, dunia kerja saat ini tengah mengalami transformasi besar akibat kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan pergeseran demografis. Revolusi industri 4.0 telah melahirkan jenis-jenis pekerjaan baru yang menuntut keterampilan digital dan adaptabilitas tinggi, sementara pekerjaan tradisional di sektor-sektor padat karya mulai mengalami penurunan. Di sisi lain, transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan juga menciptakan peluang baru di sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian ramah lingkungan. Semua perubahan ini menuntut sistem ketenagakerjaan yang lebih fleksibel, inklusif, dan tangguh terhadap guncangan.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi usia produktif yang besar, memiliki potensi luar biasa untuk memanfaatkan bonus demografi. Namun, potensi ini hanya dapat diwujudkan jika tersedia ekosistem ketenagakerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal dan memberikan pekerjaan yang layak. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berupa tingginya angka pengangguran dan pekerja informal, tetapi juga rendahnya produktivitas, kesenjangan keterampilan, dan ketimpangan gender dalam akses terhadap pekerjaan yang bermutu. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang tidak hanya banyak, tetapi juga bermartabat, aman, dan berkeadilan.

Dalam kerangka tersebut, penting untuk menyoroti bagaimana isu ketenagakerjaan dimaknai dan diimplementasikan di tingkat lokal. Kota Jambi, sebagai ibu kota Provinsi Jambi dan pusat pertumbuhan ekonomi regional, memiliki peran strategis dalam mengembangkan model ketenagakerjaan yang

inklusif dan berkelanjutan. Dengan populasi yang terus bertambah dan struktur ekonomi yang semakin beragam, Kota Jambi menghadapi tantangan ganda: menciptakan lapangan kerja baru yang relevan dengan kebutuhan zaman, sekaligus memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan tidak tertinggal dalam proses pembangunan.

Dalam upaya membangun sistem ketenagakerjaan yang adil dan manusiawi, pengupahan yang layak dan perlindungan sosial yang menyeluruh menjadi dua fondasi utama yang tidak dapat dipisahkan. Di Kota Jambi, kesadaran akan pentingnya kedua aspek ini mulai tumbuh seiring dengan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan warga. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah hadirnya **Program Kampung Bahagia**, sebuah inisiatif pembangunan berbasis komunitas yang menempatkan kesejahteraan pekerja rentan sebagai prioritas utama.

Melalui program ini, pemerintah kota memberikan ruang bagi setiap lingkungan RT untuk merancang dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan warganya, termasuk dalam hal perlindungan sosial. Dana yang dialokasikan tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik seperti jalan atau drainase, tetapi juga untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pekerja informal seperti tukang becak, pengemudi ojek, pedagang kecil, buruh harian, hingga ibu rumah tangga pelaku usaha rumahan menjadi kelompok sasaran utama yang kini mulai mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak.

Yang menjadikan **Kampung Bahagia** istimewa adalah pendekatannya yang partisipatif dan berbasis solidaritas sosial. Pengurus RT bersama warga secara aktif memetakan siapa saja yang tergolong pekerja rentan di lingkungannya, lalu mengalokasikan sebagian dana untuk mendaftarkan mereka ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan cara ini, perlindungan tidak lagi menjadi hak istimewa bagi pekerja formal, tetapi menjadi hak dasar bagi siapa pun yang bekerja, apa pun bentuk dan skalanya. Lebih dari sekadar administrasi, langkah ini menciptakan rasa aman, rasa dihargai, dan rasa memiliki terhadap negara dan komunitas.

Dalam konteks pengupahan, meskipun belum tersedia data terpilah yang menunjukkan perbedaan rata-rata upah antara laki-laki dan perempuan, semangat keadilan tetap menjadi benang merah dalam kebijakan ketenagakerjaan Kota Jambi. Pemerintah daerah terus mendorong dunia usaha untuk menerapkan prinsip transparansi dan kesetaraan dalam sistem penggajian, serta membuka ruang dialog antara pekerja dan pemberi kerja. Kampung Bahagia, dalam hal ini, menjadi ruang eksperimental yang memungkinkan warga mendiskusikan nilai kerja, kebutuhan dasar, dan standar hidup yang layak secara terbuka dan kolektif.

Dengan menjadikan perlindungan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan lingkungan, Kampung Bahagia telah menggeser paradigma pembangunan dari yang semula bersifat fisik dan elitis, menjadi lebih sosial, inklusif, dan berkeadilan. Ia bukan hanya program, tetapi cerminan dari semangat baru Kota Jambi dalam memaknai pembangunan: bahwa kesejahteraan bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan rasa aman dan

martabat yang dirasakan oleh setiap warga, terutama mereka yang selama ini berada di pinggiran sistem.

A. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja merupakan kelompok penduduk yang berada dalam rentang usia produktif dan secara teoritis memiliki potensi untuk bekerja, mencari pekerjaan, atau terlibat dalam kegiatan ekonomi lainnya. Dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan, kelompok ini menjadi pusat perhatian karena merekalah yang menopang produktivitas daerah dan menentukan arah pertumbuhan ekonomi ke depan. Di Kota Jambi, struktur demografi menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada dalam kategori usia kerja, mencerminkan potensi besar yang dapat dimobilisasi untuk mendukung pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, potensi ini tidak serta-merta dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa dukungan kebijakan yang tepat. Sebagian dari penduduk usia kerja masih menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, minimnya informasi pasar kerja, serta norma sosial yang membatasi partisipasi kelompok tertentu terutama perempuan dan penyandang disabilitas. Selain itu, tidak semua penduduk usia kerja tergolong dalam angkatan kerja aktif; sebagian lainnya termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja, seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau mereka yang memilih tidak bekerja karena alasan pribadi atau sosial.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan penduduk usia kerja bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal kualitas dan kesiapan mereka untuk terlibat dalam dunia kerja. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung peningkatan kapasitas, keterampilan, dan daya saing tenaga kerja lokal. Program pelatihan vokasi, penyediaan informasi pasar kerja, serta penguatan pendidikan menengah dan tinggi menjadi kunci dalam mengoptimalkan bonus demografi yang dimiliki Kota Jambi.

Tabel 6.1

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Jambi tahun 2024

| No | Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | Angkatan Kerja | 197.850 | 125.468 | 323.318 |
| | a. Bekerja | 188.625 | 110.818 | 299.443 |
| | b. Pengangguran terbuka | 9.225 | 14.650 | 23.875 |
| 2. | Bukan Angkatan Kerja | 45.865 | 117.715 | 163.580 |
| | a. Sekolah | 25.015 | 21.746 | 46.761 |
| | b. Mengurus rumah tangga | 12.700 | 91.726 | 104.426 |
| | c. Lainnya | 8.150 | 4.243 | 12.393 |
| Total | | 243.715 | 243.183 | 486.898 |

Sumber : Kota Jambi dalam Angka tahun 2025

B. Pencari Kerja Terdaftar

Pencari kerja terdaftar merupakan individu yang secara aktif melaporkan diri ke instansi ketenagakerjaan untuk mendapatkan pekerjaan, baik melalui Dinas Ketenagakerjaan, layanan daring, maupun kegiatan seperti bursa kerja. Mereka mencerminkan wajah nyata dari harapan, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi oleh angkatan kerja, khususnya generasi muda yang baru memasuki dunia kerja. Di Kota Jambi, jumlah pencari kerja yang terdaftar setiap tahunnya menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, serta efektivitas program pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Sebagian besar pencari kerja terdaftar berasal dari kelompok usia muda, lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi, yang memiliki semangat tinggi namun sering kali belum memiliki pengalaman kerja yang memadai. Di sisi lain, terdapat pula pencari kerja dari kalangan usia dewasa yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau ingin beralih profesi. Keberagaman latar belakang ini menuntut pendekatan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Pemerintah Kota Jambi merespons kondisi ini dengan menyelenggarakan berbagai program penempatan kerja, termasuk *Job Fair Bahagia*, yang menjadi ruang pertemuan antara pencari kerja dan dunia usaha. Melalui kegiatan ini, pencari kerja tidak hanya mendapatkan akses terhadap lowongan kerja, tetapi juga memperoleh informasi, pelatihan, dan pendampingan yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing mereka. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pencari kerja bukan sekadar angka statistik, melainkan individu-individu

yang membawa harapan dan potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan kota.

Namun demikian, tantangan masih membayangi. Tidak semua pencari kerja memiliki akses yang sama terhadap informasi dan peluang kerja, terutama mereka yang tinggal di wilayah pinggiran atau berasal dari kelompok rentan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat sistem layanan ketenagakerjaan yang inklusif, berbasis data, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, setiap pencari kerja memiliki peluang yang adil untuk tumbuh, berkembang, dan menemukan ruang kerja yang sesuai dengan potensi dan aspirasinya.

Tabel 6.2

Jumlah Pencari Kerja terdaftar di Kota Jambi menurut jenis kelamin tahun 2024

| No | Indikator | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | Pencari kerja terdaftar | 565 | 692 | 1.257 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi tahun 2025

C. Tenaga Kerja Migran

Dalam era keterbukaan ekonomi dan integrasi pasar tenaga kerja global, migrasi kerja menjadi salah satu pilihan strategis bagi penduduk usia kerja untuk meningkatkan taraf hidup dan memperluas pengalaman profesional. Kota Jambi, sebagai salah satu daerah dengan populasi muda yang besar dan semangat kerja tinggi, turut berkontribusi dalam mengirimkan tenaga kerja ke

luar negeri melalui skema resmi yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Para pekerja migran ini tidak hanya membawa harapan bagi keluarganya, tetapi juga menjadi duta keterampilan dan etos kerja Indonesia di kancah internasional.

Sebagian besar tenaga kerja migran asal Kota Jambi memilih negara-negara maju di Asia Timur dan Eropa sebagai tujuan, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman. Pilihan ini didorong oleh peluang kerja yang menjanjikan, sistem perlindungan yang lebih baik, serta kebutuhan tenaga kerja asing di sektor-sektor tertentu seperti perawatan lansia, manufaktur, dan jasa. Pemerintah Kota Jambi, melalui kerja sama dengan lembaga nasional seperti BP2MI dan Dinas Ketenagakerjaan, aktif memfasilitasi proses rekrutmen, pelatihan pra-keberangkatan, dan pendampingan administratif agar seluruh proses berjalan secara prosedural dan aman.

Namun, di balik peluang tersebut, terdapat pula tantangan yang perlu diantisipasi. Tidak semua calon pekerja migran memiliki pemahaman yang memadai tentang prosedur resmi, sehingga masih ditemukan upaya pemberangkatan non-prosedural yang berisiko tinggi terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi. Oleh karena itu, edukasi publik dan pengawasan ketat terhadap agen penempatan menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa migrasi kerja benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan, bukan jebakan yang menjerumuskan.

Program Kampung Bahagia juga memainkan peran dalam mendukung kesiapan warga untuk bekerja ke luar negeri. Melalui dana komunitas yang fleksibel, beberapa lingkungan menggunakannya untuk membiayai pelatihan

bahasa, keterampilan kerja, hingga pengurusan dokumen bagi calon pekerja migran. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa migrasi kerja bukan hanya urusan individu, tetapi juga bagian dari strategi kolektif komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dengan tata kelola yang baik, perlindungan yang kuat, dan dukungan komunitas yang solid, tenaga kerja migran asal Kota Jambi dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat tidak hanya bagi keluarga mereka, tetapi juga bagi pembangunan daerah secara keseluruhan. Mereka adalah wajah dari semangat kerja keras, keberanian melintasi batas, dan harapan akan masa depan yang lebih baik.

Tabel 6.3

Jumlah Tenaga kerja Migran terdaftar di Kota Jambi menurut jenis kelamin tahun 2024

| No | Indikator | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|---------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | Tenaga Kerja Migran | 15 | 8 | 23 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi tahun 2025

D. Pengangguran

Pengangguran bukan sekadar angka dalam laporan statistik, melainkan potret nyata dari ketimpangan akses terhadap kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara keterampilan dan kebutuhan pasar, serta keterbatasan sistem yang belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di Kota Jambi, fenomena pengangguran menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif.

Meskipun berbagai program telah digulirkan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, masih banyak individu yang belum berhasil terserap ke dalam dunia kerja secara optimal.

Sebagian besar dari mereka yang menganggur adalah generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan, namun belum memiliki pengalaman kerja yang memadai. Mereka membawa semangat dan harapan, tetapi sering kali terhambat oleh kurangnya informasi, keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan industri, atau bahkan oleh norma sosial yang membatasi ruang gerak mereka terutama bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Di sisi lain, terdapat pula pekerja usia dewasa yang kehilangan pekerjaan akibat perubahan struktur ekonomi, otomatisasi, atau dampak dari krisis yang bersifat lokal maupun global. Mereka menghadapi tantangan ganda: harus bersaing dengan tenaga kerja muda, sekaligus menyesuaikan diri dengan tuntutan keterampilan baru yang terus berkembang.

Pemerintah Kota Jambi menyadari bahwa pengangguran tidak dapat diatasi hanya dengan membuka lowongan kerja semata. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bersifat lebih menyeluruh, mencakup pelatihan vokasi, penyediaan informasi pasar kerja, serta penguatan sistem layanan ketenagakerjaan berbasis digital. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah penyelenggaraan *Job Fair Bahagia*, yang tidak hanya menjadi ajang rekrutmen, tetapi juga ruang edukasi dan pemberdayaan. Di dalamnya, pencari kerja dapat mengikuti pelatihan singkat, konsultasi karier, hingga simulasi wawancara kerja. Kegiatan ini menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, serta mempertemukan harapan pencari kerja dengan kebutuhan riil dunia usaha.

Lebih dari itu, *Program Kampung Bahagia* kembali menunjukkan perannya sebagai katalisator perubahan sosial. Di beberapa lingkungan, dana komunitas digunakan untuk mendanai pelatihan keterampilan kerja, penyediaan fasilitas internet gratis untuk akses informasi lowongan, hingga pendampingan administratif bagi warga yang ingin melamar pekerjaan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pengangguran bukan hanya persoalan individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif yang dapat diatasi melalui solidaritas sosial dan kebijakan berbasis komunitas. Ketika satu warga berhasil mendapatkan pekerjaan, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu tersebut, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Namun demikian, tantangan struktural masih membayangi. Ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai, rendahnya literasi digital di kalangan tertentu, serta belum meratanya akses terhadap pelatihan berkualitas menjadi hambatan yang perlu diatasi secara sistematis. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan berkeadilan.

Pengangguran, dalam konteks ini, bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan titik awal untuk merancang strategi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan. Kota Jambi, dengan segala potensinya, memiliki peluang besar untuk menjadikan tantangan ini sebagai momentum

transformasi—dari sekadar menciptakan pekerjaan, menjadi menciptakan masa depan yang lebih bermakna bagi setiap warganya.

Tabel 6.4

Jumlah Pengangguran terdata di Kota Jambi menurut jenis kelamin tahun 2024

| No | Indikator | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|--------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | Pengangguran | 14.650 | 9.225 | 23.875 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi tahun 2025

E. Pekerja Terkena PHK

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan salah satu dampak paling nyata dari ketidakstabilan ekonomi dan perubahan struktur industri. Bagi pekerja, PHK bukan sekadar kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan rasa aman, identitas sosial, dan kepastian masa depan. Di Kota Jambi, gelombang PHK yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi pengingat bahwa dunia kerja tidak selalu stabil, dan bahwa sistem perlindungan tenaga kerja harus mampu merespons dengan cepat dan manusiawi.

Pekerja yang terkena PHK berasal dari berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur, perdagangan, hingga jasa. Sebagian besar dari mereka adalah tulang punggung keluarga, yang tiba-tiba harus menghadapi realitas baru tanpa penghasilan tetap. Tidak sedikit pula yang mengalami tekanan psikologis akibat kehilangan pekerjaan secara mendadak, terutama ketika PHK dilakukan tanpa komunikasi yang transparan atau tanpa pemenuhan hak-hak normatif. Dalam situasi seperti ini, ketahanan sosial menjadi sangat penting—baik dari sisi individu maupun komunitas.

Pemerintah Kota Jambi merespons kondisi ini dengan pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga empatik. Melalui penyelenggaraan Job Fair Bahagia, pemerintah membuka ribuan peluang kerja baru yang dapat diakses oleh para korban PHK. Bursa kerja ini tidak hanya menjadi ruang rekrutmen, tetapi juga menjadi simbol harapan dan pemulihan. Di dalamnya, para pencari kerja mendapatkan akses terhadap pelatihan singkat, konsultasi karier, dan informasi lowongan kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Lebih dari itu, **Program Kampung Bahagia** kembali menunjukkan perannya sebagai jaring pengaman sosial yang tangguh. Di beberapa lingkungan, dana komunitas digunakan untuk membantu warga yang terkena PHK, baik melalui pelatihan keterampilan baru, bantuan modal usaha kecil, maupun pendampingan administratif untuk mengakses program jaminan sosial. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemulihan pasca-PHK tidak harus selalu bergantung pada intervensi pusat, tetapi bisa dimulai dari solidaritas lokal yang konkret dan berkelanjutan.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Tidak semua pekerja yang terkena PHK memiliki kesiapan untuk langsung beradaptasi dengan jenis pekerjaan baru, terutama jika keterampilan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem pelatihan vokasi yang responsif, memperluas akses terhadap informasi kerja, dan memastikan bahwa setiap pekerja yang terdampak mendapatkan hak-haknya secara utuh.

PHK memang menyisakan luka, tetapi juga membuka ruang untuk transformasi. Dengan dukungan yang tepat, pekerja yang terkena PHK dapat bangkit kembali—bukan hanya sebagai pencari kerja, tetapi sebagai pelaku perubahan yang lebih tangguh dan berdaya. Kota Jambi, melalui kebijakan yang inklusif dan berbasis komunitas, menunjukkan bahwa pemulihan bukan sekadar wacana, melainkan proses nyata yang dimulai dari empati, kolaborasi, dan keberpihakan pada mereka yang paling terdampak.

Tabel 6.5

Jumlah Pekerja Terkena PHK terdata di Kota Jambi menurut jenis kelamin tahun

2024

| No | Indikator | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|---------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | Pekerja Terkena PHK | 35 | 16 | 51 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi tahun 2025

F. Koperasi

Koperasi merupakan bentuk kelembagaan ekonomi yang tumbuh dari semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Di tengah tantangan ketimpangan ekonomi dan dominasi pasar yang sering kali tidak berpihak pada kelompok kecil, koperasi hadir sebagai alternatif yang menempatkan manusia sebagai pusat dari kegiatan ekonomi. Di Kota Jambi, koperasi tidak hanya dipandang sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai ruang pemberdayaan, pendidikan ekonomi, dan penguatan komunitas lokal.

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi gerakan koperasi di Kota Jambi, seiring dengan diluncurkannya inisiatif **Koperasi Merah Putih** yang digagas oleh pemerintah pusat dan didorong secara aktif oleh Pemerintah Kota Jambi. Program ini bertujuan membentuk koperasi di setiap kelurahan dan desa sebagai bagian dari strategi membangun ekosistem ekonomi yang sehat, mandiri, dan berbasis komunitas. Koperasi Merah Putih dirancang untuk menjadi wadah distribusi kebutuhan pokok, penyalur energi rumah tangga, hingga pengelola usaha produktif warga. Dengan pendekatan ini, koperasi tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga instrumen kedaulatan pangan dan energi di tingkat lokal.

Pemerintah Kota Jambi menunjukkan komitmen kuat dalam mendampingi proses pendirian koperasi ini, mulai dari penyusunan akta notaris, pelatihan pengelolaan keuangan, hingga fasilitasi perizinan usaha. Pendampingan ini dilakukan secara bertahap dan partisipatif, dengan melibatkan perangkat kelurahan, notaris, dan unsur masyarakat. Di beberapa wilayah, koperasi bahkan mulai dikembangkan sebagai unit usaha yang terintegrasi dengan program Kampung Bahagia, sehingga dana komunitas dapat digunakan untuk memperkuat modal koperasi, membiayai pelatihan anggota, atau mendukung kegiatan ekonomi produktif warga.

Lebih dari sekadar lembaga ekonomi, koperasi di Kota Jambi mulai menjadi ruang belajar bersama. Di dalamnya, warga belajar tentang tata kelola yang transparan, pengambilan keputusan yang demokratis, serta pentingnya akuntabilitas dalam mengelola sumber daya bersama. Koperasi juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan, pemuda, dan kelompok

rentan untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, tanpa harus bergantung pada modal besar atau jaringan bisnis yang eksklusif.

Dengan semangat kebersamaan dan dukungan kebijakan yang progresif, koperasi di Kota Jambi berpotensi menjadi fondasi ekonomi lokal yang tangguh dan berkeadilan. Ia bukan hanya tempat menyimpan simpanan atau mengambil pinjaman, tetapi juga ruang tumbuhnya harapan, solidaritas, dan kemandirian warga. Dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan, koperasi menjadi jembatan antara kebutuhan ekonomi dan nilai-nilai sosial yang memperkuat kohesi komunitas.

Tabel 6.6

Jumlah Koperasi terdata di Kota Jambi menurut jenis kelamin tahun 2024

| No | Indikator | Status | | Jumlah |
|----|-----------|--------|-------------|--------|
| | | Aktif | Tidak Aktif | |
| 1. | Koperasi | 220 | 239 | 459 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi tahun 2025

BAB VII

PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Perempuan telah menjadi pilar penting dalam pembangunan Kota Jambi, khususnya dalam sektor publik yang mencakup pemerintahan, pelayanan masyarakat, pendidikan, dan peran-peran kepemimpinan di berbagai lembaga. Dalam beberapa tahun terakhir, arah pembangunan Kota Jambi mengalami transformasi yang berfokus pada kesejahteraan warganya secara holistik melalui program unggulan ***Kota Jambi Bahagia***. Program ini bukan sekadar slogan, melainkan visi yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan kultural, dengan penekanan kuat terhadap inklusivitas dan partisipasi masyarakat secara setara—termasuk perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam mewujudkan Jambi yang “*bahagia*” sangat terasa, terutama ketika mereka diberikan ruang dan kesempatan yang adil dalam menentukan arah kebijakan dan pelayanan publik. Misalnya, peningkatan jumlah perempuan yang menjabat sebagai kepala perangkat daerah atau menduduki posisi strategis di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perencanaan pembangunan, menunjukkan langkah positif terhadap pengarusutamaan gender. Dalam konteks Kota Jambi Bahagia, indikator kebahagiaan warga mencakup perasaan aman, akses terhadap layanan dasar yang berkualitas, serta partisipasi dalam pengambilan Keputusan semuanya adalah bidang yang sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif perempuan di ranah publik.

Namun, jalan menuju kesetaraan ini bukan tanpa tantangan. Banyak perempuan masih menghadapi hambatan struktural seperti bias gender dalam proses rekrutmen dan promosi jabatan, kurangnya pelatihan kepemimpinan yang sensitif gender, serta minimnya kebijakan yang mendukung fleksibilitas kerja bagi perempuan yang mengemban peran ganda sebagai pekerja sekaligus pengelola urusan domestik. Untuk itu, integrasi perspektif gender ke dalam program Kota Jambi Bahagia menjadi kunci. Program ini, apabila dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, bisa menjadi wadah transformatif bagi perempuan untuk tidak hanya dilibatkan, tetapi dilibatkan secara bermakna.

Di berbagai kelurahan, perempuan menjadi motor penggerak kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, koperasi perempuan, dan forum dialog warga. Tak hanya itu, kehadiran perempuan dalam unit layanan public seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), sekolah, dan pusat layanan terpadu untuk perlindungan perempuan dan anak menunjukkan betapa pentingnya perspektif dan kepekaan gender dalam pelayanan yang inklusif dan ramah masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan **program Kota Jambi Bahagia** tidak dapat dipisahkan dari sejauh mana perempuan diberikan ruang dan kepercayaan untuk menjadi agen perubahan di sektor publik. Ketika perempuan diberdayakan dan kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman mereka, maka kebahagiaan bukan sekadar target pembangunan, melainkan kenyataan yang dirasakan bersama. Kota Jambi memiliki potensi besar untuk menjadi teladan kota yang membuktikan bahwa

keadilan gender bukan hanya isu moral, tetapi strategi pembangunan yang esensial untuk kesejahteraan kolektif.

A. Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif

Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif di Kota Jambi merupakan cerminan dari kemajuan demokrasi yang inklusif serta pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan publik. Meskipun jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi legislatif belum mencapai representasi ideal sebagaimana semangat 30 persen keterwakilan yang diamanatkan dalam kebijakan afirmatif nasional, tren partisipasi ini memperlihatkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Kota Jambi membawa perspektif yang lebih luas terhadap isu-isu sosial, terutama dalam hal pendidikan, perlindungan anak, kesehatan ibu, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga isu-isu yang seringkali luput dari prioritas ketika dominasi kebijakan hanya berasal dari sudut pandang maskulin.

Namun, pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang masih harus dihadapi. Proses pencalonan masih diwarnai bias struktural, di mana perempuan sering kali hanya dijadikan pelengkap dalam daftar caleg tanpa dukungan nyata dari partai politik. Tak jarang pula mereka menghadapi resistensi dari budaya patriarkis yang meragukan kapasitas kepemimpinan perempuan. Padahal, kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif terbukti mampu memperkaya kualitas perdebatan kebijakan dan memastikan bahwa suara kelompok rentan tidak terpinggirkan. Dalam konteks Kota Jambi, beberapa legislator perempuan bahkan telah menunjukkan inisiatif luar biasa

dengan menggagas Peraturan Daerah yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak, serta mendorong anggaran responsif gender (gender responsive budgeting) dalam penyusunan APBD.

Program Kota Jambi Bahagia yang mengedepankan kesejahteraan emosional, sosial, dan partisipasi aktif warga, memberikan ruang yang besar bagi perempuan untuk berkontribusi secara langsung dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini terlihat dari sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung program-program pemberdayaan berbasis komunitas yang dipimpin oleh kader perempuan. Upaya ini perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas politik Perempuan mulai dari pelatihan kepemimpinan, komunikasi publik, hingga advokasi kebijakan agar mereka tidak hanya terpilih, tetapi juga berdaya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ke depan, partisipasi perempuan dalam legislatif harus dijadikan prioritas dalam agenda pembangunan politik lokal. Penataan sistem pemilu yang lebih adil, penguatan regulasi afirmatif, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya pemimpin perempuan merupakan langkah strategis yang perlu terus diperjuangkan. Karena demokrasi yang bahagia adalah demokrasi yang memberi ruang setara bagi seluruh warganya untuk menentukan arah masa depan. Dalam semangat Kota Jambi Bahagia, representasi perempuan di legislatif bukan hanya indikator statistik, tetapi simbol harapan bahwa keadilan dan keberagaman menjadi dasar dari semua kebijakan yang dilahirkan.

Tabel 7.1

Anggota legislatif Perempuan pada DPRD Kota Jambi Tahun 2025

| No | Partai Politik | Nama | Jabatan |
|----|-----------------|--------------------------------|---------|
| 1. | Golkar | Dyah Kumala Dewi ZM, SH | Anggota |
| 2. | Nasdem | Riza Delviarista | Anggota |
| 3. | PAN | Menno Eka Desthya, Sst., MKM | Anggota |
| 4. | PDI- Perjuangan | Maria Magdalena, SS | Anggota |
| 5. | PKB | Syofni Herawati, SP | Anggota |
| 6. | Demokrat | RR. Nelly Kurniasih Kawuri, SE | Anggota |
| 7. | Demokrat | Hj. Hedriani, S. Pd | Anggota |

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Jambi tahun 2025

B. Perempuan di Pemerintahan

Kehadiran perempuan dalam struktur pemerintahan Kota Jambi menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, peran perempuan di pemerintahan tidak lagi terbatas pada fungsi administratif atau pendampingan semata, melainkan telah berkembang menjadi posisi-posisi strategis yang berpengaruh dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Seiring dengan visi Kota Jambi Bahagia yang menempatkan kesejahteraan sosial dan partisipasi aktif warga sebagai inti pembangunan, keterlibatan perempuan di tubuh pemerintahan menjadi pilar utama untuk menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan merepresentasikan

pengalaman dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini termarjinalkan.

Meski demikian, data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di jabatan struktural pemerintahan seperti kepala dinas, sekretaris daerah, camat, lurah, hingga jabatan fungsional strategis masih belum merata di semua sektor. Terdapat kecenderungan konsentrasi perempuan di bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan masyarakat, sementara bidang seperti infrastruktur, keuangan, dan tata kelola wilayah masih didominasi laki-laki. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa masih diperlukan upaya sistematis untuk menciptakan ruang yang setara bagi perempuan dalam mengakses dan menduduki posisi pimpinan di seluruh sektor pemerintahan. Kota Jambi sendiri telah mulai merespon isu ini melalui penguatan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dan pelatihan kepemimpinan perempuan, namun tantangan di tingkat implementasi, budaya organisasi, dan persepsi publik masih terus menghantui proses transformasi ini.

Menariknya, di beberapa wilayah kerja pemerintah Kota Jambi, muncul figur-figur perempuan birokrat dan teknokrat yang menjadi teladan perubahan. Mereka tidak hanya memperlihatkan kapasitas manajerial dan profesionalisme tinggi, tetapi juga membawa pendekatan kepemimpinan yang lebih partisipatif, empatik, dan berorientasi pada solusi yang berkeadilan sosial. Dalam kaitannya dengan Kota Jambi Bahagia, gaya kepemimpinan perempuan di pemerintahan sering kali lebih sensitif terhadap dinamika sosial dan keseimbangan ekosistem masyarakat, menjadikan mereka kontributor penting dalam merancang

program-program berbasis kesejahteraan kolektif seperti pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan keluarga, dan pemenuhan hak dasar warga.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan gender, dibutuhkan komitmen berkelanjutan dari semua pihak baik itu melalui regulasi afirmatif, sistem meritokrasi yang transparan, pelatihan dan mentoring bagi calon pemimpin perempuan, serta penguatan budaya kerja yang menghargai keberagaman dan menghentikan praktik diskriminasi. Pemerintah Kota Jambi memiliki peluang besar untuk menjadi role model di tingkat nasional dalam pengarusutamaan perempuan di pemerintahan, bukan hanya sebagai simbol keterwakilan, melainkan sebagai agen transformasi kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada kebahagiaan dan keadilan sosial bagi seluruh warganya.

Tabel 7.2
Jumlah ASN Pemerintah Kota Jambi
menurut tahun dan jenis kelamin tahun 2024

| No | Tahun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|-------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2020 | 1.793 | 4.012 | 5.805 |
| 2. | 2021 | 1.731 | 3.893 | 5.624 |
| 3. | 2022 | 1.590 | 3.643 | 5.233 |
| 4. | 2023 | 1.552 | 3.415 | 4.967 |
| 5. | 2024 | 1.428 | 3.228 | 4.656 |

Sumber : BKPSDMD Kota Jambi tahun 2025

Tabel 7.3

Jumlah ASN Pemerintah Kota Jambi yang Menduduki
Eselon II, III, IV dan Camat, jabatan fungsional dan PPPK

| No | Jabatan | Tahun 2024 | | Jumlah |
|----|---------------------------------------|------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Eselon II | 25 | 6 | 31 |
| 2. | Eselon III | 123 | 41 | 164 |
| 4. | Eselon IV | 255 | 244 | 499 |
| 5. | Fungsional tertentu (PNS dan PPPK) | 1.344 | 4.269 | 5.613 |

Sumber : BKPSDMD Kota Jambi tahun 2025

Tabel 7.4

Jumlah ASN Pemerintah Kota Jambi
Berdasarkan Golongan tahun 2024

| No | Jabatan | Tahun 2024 | | Jumlah |
|----|--------------|------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Golongan I | 5 | - | 5 |
| 2. | Golongan II | 234 | 207 | 441 |
| 4. | Golongan III | 919 | 2.408 | 3.327 |
| 5. | Golongan IV | 270 | 613 | 883 |

Sumber : BKPSDMD Kota Jambi tahun 2025

Tabel 7.5

Jumlah ASN Pemerintah Kota Jambi
Yang telah mengikuti diklat kepemimpinan

| No | Jabatan | Tahun 2024 | |
|----|--------------------|------------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Diklat PIM TK. II | 23 | 8 |
| 2. | Diklat PIM TK. III | 105 | 39 |
| 3. | Diklat PIM TK. IV | 164 | 107 |

Sumber : BKPSDMD Kota Jambi tahun 2025

C. Organisasi Perempuan

Organisasi perempuan di Kota Jambi memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat suara kolektif perempuan, memperjuangkan hak-hak mereka, serta memperluas ruang partisipasi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Sepanjang tahun-tahun terakhir, organisasi-organisasi ini berkembang menjadi pilar masyarakat sipil yang tidak hanya fokus pada isu kesetaraan gender, tetapi juga menjadi penggerak dalam memperjuangkan keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan penguatan ekonomi keluarga. Mulai dari organisasi berbasis keagamaan, profesi, komunitas lokal, hingga lembaga swadaya masyarakat yang mengusung isu-isu gender, semuanya menunjukkan bahwa perempuan di Kota Jambi tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif mengarahkan transformasi sosial.

Dalam konteks Kota Jambi Bahagia, keberadaan organisasi perempuan memainkan peran strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan konkret warga, khususnya perempuan dan anak. Mereka menjadi mitra penting dalam menyampaikan aspirasi komunitas ke ranah kebijakan, baik melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun dialog terbuka dengan perangkat daerah. Tak jarang, mereka pula yang berada di garis depan dalam penyediaan layanan berbasis komunitas seperti pusat konsultasi keluarga, pelatihan keterampilan usaha mikro, dan advokasi bagi perempuan korban kekerasan. Organisasi seperti PKK, Aisyiyah, Fatayat NU, Dharma Wanita, dan berbagai komunitas independen lainnya

menjadi wajah dari gerakan perempuan yang dinamis dan multidimensi di Kota Jambi.

Namun, kiprah organisasi perempuan tidak lepas dari tantangan. Keterbatasan pendanaan, minimnya akses terhadap pelatihan manajerial, dan kurangnya dukungan struktural dari pemerintah sering kali membatasi ruang gerak mereka. Meskipun demikian, semangat gotong royong dan jaringan solidaritas antar organisasi perempuan terbukti menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas gerakan mereka. Beberapa organisasi bahkan telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam merancang program kolaboratif bersama sektor swasta dan pemerintah daerah seperti kegiatan pelatihan kewirausahaan ramah lingkungan, kampanye kesehatan reproduksi, dan promosi pendidikan anak perempuan di daerah pinggiran kota.

Agar organisasi perempuan semakin berdaya dan berkelanjutan, dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menyediakan ruang partisipatif yang inklusif, skema pembiayaan yang adil, serta pelibatan organisasi-organisasi ini dalam proses pengambilan keputusan strategis. Kota Jambi memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem kepemimpinan perempuan berbasis komunitas melalui penguatan kapasitas organisasi perempuan sebagai mitra pembangunan yang setara. Karena pada akhirnya, sebuah kota yang bahagia adalah kota yang mendengarkan dan memberdayakan seluruh warganya—terutama mereka yang selama ini menjadi tulang punggung solidaritas sosial, meski kerap tak terdengar: para perempuan dalam komunitas.

Tabel 7.6

Daftar Organisasi Perempuan tergabung dalam GOW Kota Jambi Tahun 2024

| NO | ORGANISASI | NAMA KETUA | ALAMAT |
|----|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | GOW | DR.dr.HJ. Nadiyah, SPoG | Jl. Samarinda No. 01 Kel. Paal Lima Kota Baru - Jambi |
| 2 | AISYIYAH | Hj. Amelia | Jl. Pattimura |
| 3 | WKRI | Theresia Ari Sukarni | Gereja Khatolik St.Theresia Pasar Jambi |
| 4 | PERWARI | Hj. Saodah | Jl. MW Marawis No. 5 Jambi |
| 5 | PWKI | Pdm. Herni Lee | Jl. Prabu Siliwangi RT.23 Kel.Tj.Sari |
| 6 | IBI | Hj. Nurleli. Am.Keb | Dinas Kesehatan Kota Jambi |
| 7 | PERSIT KCK | | Kodim 0415 BTH - Simp.Puncak |
| 8 | BHAYANGKARI | Ny. Dian Dover | Jl. Bhayangkara No. 01 Kel. Tlg Banjar |
| 9 | MUSLIMAT NU | Hj. Mariyatul Qibtiyah, S.Ag | Jl.Kopral Ramli RT.45 Kel. Tlg.Bakung |
| 10 | DWP KOTA JAMBI | Hj. Choirianti Budidaya | Jl.Jend. Basuki Rahmat Kota Baru Jambi |
| 11 | Wanita Islam (WI) | Sodriah | Jl.Blekok Raya Handil Jaya (Mesjid Al-Muhajjirin) |
| 12 | Dharmayukti Karini | Ny. Zakiah Edy Pramono | Jl. A.Yani No.16 Telanaipura |
| 13 | Ikatan Adhyaksa Dharmakarini | Ny.Abdiyani F.Azhari | Jl.A.Yani No.15 Telanaipura |
| 14 | IWAPI | Hj. Sofia | Lrg. Eksekutif No. 16 Jambi |
| 15 | HWK | Yuliantie, SE | Jl.Abdul Rahman Saleh Rt.06 Kel. Pasir Putih |
| 16 | AL HIDAYAH | Dra. Hj. Nuraini Usman | Talang Bakung |
| 17 | FATAYAT NU | Nurhayati, SPd.I, M.Pd | Jl.Pattimura Komp. Griya Kenali Asri E40 Kenali Besar |
| 18 | SALIMAH | Rice Osiarni, S.Pd | Nusa Indah |

| | | | |
|----|------------------------------|---------------------------------|--|
| 19 | PERIP | Yayuk Sutrisno | Kebun Kopi Jambi |
| 20 | HWDI | Dety Herawati, S.Ag | Jl. Sutan Syahrir No.86 RT.11 Kel. Pasir Putih |
| 21 | BKMT | Hj. Laksmi | Komplek PU Pasir Putih |
| 22 | BKWK | HJ. Farida Usman | Hotel Matahari 2 Pasar Jambi |
| 23 | Bundo Kandung | Hj. Leni Suhelmi, M.Pd | Yayasan Al-Progo Jambi |
| 24 | MTP IPHI | Hj.Fatmalis Darsyam, SE,M.Si | Jl. Parluhutan Lubis Ir. Gotong Royong |
| 25 | PERWIRA | Ade Musdalifa | Depan Polsek Jelutung Jambi |
| 26 | IWSS | Hj. Nelly Tansil | Jl. Iswahyudi RT.0 Kel. Pasir Putih |
| 27 | KPI | Nuraini Silalahi | Jl. Sayuti Makalam No.75 Rt.10 Kel. Sungai Putri |
| 28 | Forsikatel | Marwiyah | Telkom - TAC Jambi |
| 29 | Alisa "KHADIOJAH" ICMI | Nina Martini, BBA | Jl. Prabu Siliwangi RT.19 No.51 Kel. Tanjung Sari |
| 30 | Perkopin | Sri Wahyuni | Depan Polsek Jelutung Jambi |
| 31 | Koperwan | Zubaidah | Jl.H.Juanda No.96 Mayang |
| 32 | IPM | Siti Zuraidah | Jl.Pratu Satir The Hok |
| 33 | KKJC | Tuti Alawiyah | Jl. Rajawali 2 RT,23 No.37 Kel.Tambak Sari |
| 34 | HPMJ | Dora Amelia, Amd | Jl.Jend. Basuki Rahmat Kota Baru Jambi |
| 35 | PDRI | Hj. Sri Artati | |
| 36 | WPP PPP | Kartini | JL. TP.Sriwijaya |

Sumber : GOW Kota Jambi tahun 2025

D. Perempuan di Sektor Pertanian

Perempuan di Kota Jambi memiliki peran yang semakin nyata dalam sektor pertanian, khususnya pada skala rumah tangga dan pertanian urban. Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh perempuan mencakup pengelolaan lahan pekarangan, budidaya tanaman hortikultura, pengolahan hasil panen, hingga pemasaran produk secara mandiri maupun melalui kelompok tani. Peran ini tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan keluarga, tetapi juga terhadap ekonomi lokal yang berbasis komunitas.

Di beberapa kelurahan, terbentuk kelompok tani perempuan yang aktif dalam kegiatan pertanian berkelanjutan. Kelompok ini menjadi wadah pembelajaran, solidaritas sosial, dan penguatan kapasitas perempuan dalam mengelola usaha tani. Meski kontribusinya besar, perempuan petani masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses terhadap lahan produktif, teknologi pertanian, pelatihan teknis, dan modal usaha. Selain itu, belum semua perempuan petani tercatat secara formal dalam sistem kelembagaan pertanian, sehingga menyulitkan mereka untuk memperoleh bantuan pemerintah atau fasilitas kredit usaha.

Pemerintah Kota Jambi melalui kebijakan pengarusutamaan gender dan program pemberdayaan ekonomi telah mulai membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan di sektor pertanian. Dukungan ini mencakup pelatihan keterampilan, fasilitasi pembentukan kelompok tani perempuan, dan integrasi perempuan dalam perencanaan pembangunan pertanian daerah. Dengan pendekatan yang inklusif dan responsif gender, perempuan petani di Kota Jambi memiliki potensi besar untuk menjadi aktor utama dalam

transformasi pertanian yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Selain berperan dalam produksi pertanian, perempuan juga aktif dalam kegiatan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Di beberapa wilayah Kota Jambi, perempuan mengembangkan usaha rumahan berbasis pertanian seperti pembuatan keripik pisang, olahan cabai, dan produk herbal dari tanaman pekarangan. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga membuka peluang wirausaha yang berbasis lokal dan ramah lingkungan. Melalui pelatihan yang difasilitasi oleh dinas terkait, perempuan memperoleh keterampilan dalam pengemasan, pemasaran digital, dan manajemen usaha sederhana. Peran ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi pelaku teknis di lapangan, tetapi juga mampu mengelola rantai nilai pertanian secara menyeluruh. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, potensi perempuan dalam sektor pertanian dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk partisipasi perempuan yang semakin menonjol dalam sektor pertanian di Kota Jambi adalah melalui Kelompok Wanita Tani (KWT). KWT menjadi wadah penting bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan bertani, memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Di berbagai kelurahan, KWT aktif dalam kegiatan budidaya tanaman hortikultura, pengolahan hasil pertanian, serta pemasaran produk lokal. Mereka juga terlibat dalam program penanaman padi serentak yang digagas oleh Pemerintah Kota Jambi, seperti yang dilakukan oleh

kelompok tani di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura. Melalui kegiatan ini, perempuan tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penggerak komunitas yang mendukung ketahanan pangan daerah. Pemerintah daerah turut memberikan dukungan berupa benih unggul, pelatihan, dan fasilitasi akses pasar, sehingga KWT mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggotanya. Peran KWT menjadi bukti bahwa perempuan memiliki kapasitas besar dalam membangun pertanian yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis komunitas.

Tabel 7.7

Perempuan Kota Jambi di Sektor Pertanian Tahun 2024

| NO | INDIKATOR | TAHUN 2024 |
|----|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) | 153 |
| 2 | Jumlah Kelompok Wanita Tani yang mendapat bantuan Pemerintah | 1 |
| 3 | Jumlah Anggota Kelompok Tani | 3.600 |
| 4 | Jumlah Kelompok Wanita Tani yang telah mendapatkan Pelatihan | 16 |

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi tahun 2025

BAB VIII**HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA**

Dalam pembangunan Kota Jambi tahun 2025, aspek hukum dan sosial budaya menjadi fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan gender. Pemerintah Kota Jambi telah menunjukkan komitmen terhadap penguatan peran perempuan melalui berbagai regulasi yang responsif gender. Salah satu kebijakan strategis adalah Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan, yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam struktur kelembagaan sosial dan adat. Peraturan ini mengatur mekanisme pembentukan dan pemilihan Ketua RT secara serentak, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat, termasuk perempuan, dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat demokrasi partisipatif dan memperluas akses perempuan terhadap ruang publik.

Di sisi sosial budaya, masyarakat Kota Jambi mengalami transformasi nilai yang signifikan. Tradisi yang sebelumnya bersifat patriarkal mulai bergeser menuju pola yang lebih egaliter, seiring dengan meningkatnya pendidikan, keterbukaan informasi, dan interaksi antarbudaya. Perempuan kini lebih banyak terlibat dalam kegiatan seni, budaya, dan komunitas sosial, baik sebagai pelaku maupun sebagai pengelola. Kegiatan seperti pelestarian budaya lokal, festival seni, dan pengelolaan warisan adat menjadi ruang ekspresi baru bagi

perempuan untuk menunjukkan identitas dan kontribusinya dalam pembangunan sosial.

Namun tantangan tetap ada, norma sosial yang membatasi ruang gerak perempuan, stereotip gender, dan ketimpangan akses terhadap keadilan hukum masih menjadi isu yang perlu diatasi. Banyak perempuan yang belum memiliki pemahaman memadai tentang hak-hak hukum mereka, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, hak waris, dan perlindungan anak. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang responsif gender perlu diperkuat melalui edukasi hukum, pendampingan, dan penyediaan layanan bantuan hukum yang mudah diakses. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama menjadi kunci dalam membangun ekosistem sosial yang mendukung pemberdayaan perempuan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, bab ini menunjukkan bahwa hukum dan budaya bukanlah entitas yang statis, melainkan ruang dinamis yang dapat diisi oleh perempuan sebagai agen perubahan. Dengan dukungan regulasi yang progresif dan transformasi nilai sosial yang inklusif, Kota Jambi memiliki potensi besar untuk menjadi kota yang menjunjung tinggi kesetaraan gender dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

A. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Sepanjang tahun 2024, Kota Jambi mencatat 177 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang seluruhnya telah ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA).

Bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual dan fisik, terutama dalam lingkup rumah tangga dan lingkungan sosial. Dari total kasus tersebut, sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan dewasa yang mengalami kekerasan dalam bentuk pelecehan, penganiayaan, hingga penelantaran.

Peningkatan jumlah laporan kasus menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk melaporkan tindakan kekerasan, meskipun tantangan seperti stigma sosial dan ketakutan terhadap pelaku masih menjadi hambatan utama. Pemerintah Kota Jambi melalui DPMPPA telah melakukan berbagai upaya pencegahan, termasuk edukasi langsung ke sekolah-sekolah, pesantren, dan madrasah. Materi edukasi disesuaikan dengan usia peserta, mulai dari pengenalan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh hingga pemahaman tentang bullying dan bahaya geng motor bagi remaja.

Selain edukasi, korban kekerasan juga mendapatkan pendampingan psikologis dan bantuan hukum, baik melalui jalur kekeluargaan maupun proses persidangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Pemerintah daerah juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan kasus kekerasan melalui kanal resmi DPMPPA, sebagai bagian dari gerakan kolektif menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jambi juga mencerminkan perlunya sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Selain edukasi dan pendampingan, penting

bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, termasuk kepolisian, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pembentukan mekanisme rujukan terpadu, pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang perspektif gender, serta penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan. Di sisi lain, keterlibatan tokoh agama dan adat dalam kampanye pencegahan kekerasan dapat memperkuat pesan moral dan sosial yang mendukung perlindungan perempuan dan anak. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, Kota Jambi dapat membangun ekosistem sosial yang lebih aman, adil, dan ramah bagi seluruh warganya, terutama kelompok rentan yang selama ini menjadi korban kekerasan.

Tabel 8.1

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Per-Kecamatan
Di Kota Jambi tahun 2024

| No | Kecamatan | 2024 | KDRT | | | | Kekerasan Terhadap Perempuan | Pelecehan/ Kekerasan Terhadap Anak | | TPPO | |
|--------------|------------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | Istri | Suami | Anak | | | L | P | L | P |
| | | | | | L | P | | | | | |
| 1 | Telanaipura | 17 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Jambi Selatan | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Jambi Timur | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Pasar Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pelayangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Danau Teluk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kota Baru | 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Jelutung | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Alam Barajo | 45 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 21 |
| 10 | Paal Merah | 25 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Danau Sipin | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Rujukan Provinsi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 177 | 37 | 1 | 14 | 11 | 24 | 26 | 42 | 0 | 22 |

Sumber : UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DPMPPA Kota Jambi tahun 2025

B. Perempuan Kepala Keluarga

Di tengah perubahan struktur sosial yang semakin kompleks, keberadaan perempuan sebagai kepala rumah tangga (PKRT) di Kota Jambi menjadi salah satu indikator penting dalam memahami dinamika ketimpangan gender sekaligus ketahanan sosial keluarga. PKRT adalah perempuan yang memikul tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan emosional keluarga. Peran ini dijalani baik secara terpaksa akibat kondisi seperti perceraian, kematian pasangan, ataupun secara sukarela dalam konteks keluarga tertentu. Keberadaan mereka kerap luput dari perhatian arus utama kebijakan, padahal beban yang diemban jauh melampaui peran konvensional perempuan dalam rumah tangga.

Data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi menunjukkan tren peningkatan jumlah PKRT dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tahun 2024, tercatat lebih dari 15 % rumah tangga di Kota Jambi dipimpin oleh perempuan, dengan distribusi sebaran tertinggi di Kecamatan Jambi Timur dan Telanaipura. Sebagian besar PKRT berada pada rentang usia produktif, yakni 30-55 tahun, dan memiliki tanggungan anak usia sekolah. Kondisi ini tidak hanya menambah beban ekonomi, tetapi juga psikososial, karena mereka dihadapkan pada peran ganda tanpa sokongan struktural yang memadai.

Secara sosiokultural, peran PKRT sering kali dikaitkan dengan stereotip negatif yang berdampak pada rasa percaya diri dan penerimaan sosial mereka. Stigma “keluarga tidak lengkap” masih hidup dalam sebagian masyarakat, yang menyebabkan perempuan kepala rumah tangga mengalami diskriminasi dalam

akses pekerjaan, layanan sosial, maupun partisipasi komunitas. Padahal, banyak dari mereka justru memperlihatkan ketahanan luar biasa, menjadi figur inspiratif dalam komunitasnya dan mampu membangun ekonomi keluarga secara mandiri.

Tantangan terbesar yang dihadapi PKRT meliputi rendahnya akses terhadap pekerjaan layak, minimnya keterampilan kerja formal, tidak terjaminnya layanan kesehatan, serta keterbatasan waktu untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan. Sebagian besar PKRT bekerja di sektor informal sebagai pedagang kecil, buruh cuci, atau pekerja rumah tangga tanpa jaminan perlindungan kerja dan risiko ekonomi yang tinggi. Situasi ini berdampak langsung pada kesejahteraan anak-anak dalam rumah tangga, mulai dari pendidikan, nutrisi, hingga kesehatan mental.

Dalam merespons kondisi ini, Pemerintah Kota Jambi telah merancang beberapa program pemberdayaan, antara lain pelatihan keterampilan berbasis kewirausahaan, bantuan sosial bersyarat, serta pendampingan psikologis dan hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak. Meski upaya ini perlu diapresiasi, cakupan dan keberlanjutannya masih belum merata di semua wilayah. Sebagian PKRT belum sepenuhnya teridentifikasi atau enggan mengakses layanan karena berbagai hambatan, termasuk minimnya informasi dan ketidakpercayaan terhadap lembaga formal.

Rekomendasi strategis untuk penguatan PKRT meliputi peningkatan literasi keuangan dan digital melalui program pelatihan berbasis komunitas, penguatan jaringan UMKM perempuan, serta penyediaan layanan penitipan

anak dan dukungan psikososial di tingkat kelurahan. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem data terpilah yang lebih akurat tentang PKRT, guna mendukung perencanaan kebijakan yang berbasis bukti. Pengarusutamaan gender dalam RPJMD dan Musrenbang menjadi penting agar suara PKRT dapat terakomodasi secara sistemik dalam pembangunan daerah.

Tabel 8.2

Jumlah Kepala Keluarga di Kota Jambi
Menurut Tahun dan Jenis Kelamin tahun 2024

| No. | Tahun | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | Telanaipura | 14.111 | 3.038 | 17.149 |
| 2. | Jambi Selatan | 14.617 | 3.647 | 18.264 |
| 3. | Jambi Timur | 16.833 | 4.380 | 21.213 |
| 4. | Pasar Jambi | 2.704 | 873 | 3.577 |
| 5. | Pelayangan | 3.391 | 814 | 4.205 |
| 6. | Danau Teluk | 3.389 | 789 | 4.178 |
| 7. | Kota Baru | 23.329 | 4.407 | 27.736 |
| 8. | Jelutung | 15.160 | 3.861 | 19.021 |
| 9. | Alam Barajo | 29.306 | 5.362 | 34.668 |
| 10. | Danau Sipin | 10.530 | 2.891 | 13.421 |
| 11. | Paal Merah | 28.968 | 5.184 | 34.152 |
| Total | | 162.338 | 35.246 | 197.584 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tahun 2025

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Buku Profil Gender Kota Jambi Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengarusutamaan gender dan mengintegrasikan prinsip kesetaraan dalam pembangunan daerah. Buku ini tidak hanya memuat data terpilah antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga menggambarkan kondisi riil yang dihadapi kelompok rentan terutama perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui analisis yang mendalam pada tiap sektor seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum dan sosial budaya, serta perlindungan sosial, kita memahami bahwa tantangan kesetaraan gender masih bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan lintas sektor yang berkelanjutan.

Salah satu temuan penting dari buku ini adalah kenyataan bahwa meskipun terdapat kemajuan, ketimpangan gender masih kentara dalam banyak aspek. Tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan sudah menunjukkan peningkatan, namun akses terhadap pekerjaan layak, posisi pengambilan keputusan, serta keterlibatan dalam kegiatan politik dan kepemimpinan publik masih tertinggal. Lebih jauh lagi, perempuan kepala rumah tangga masih menghadapi beban ganda dan risiko kemiskinan yang tinggi, sementara angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menunjukkan urgensi penanganan serius dari berbagai pihak.

Kesimpulan lain yang dapat ditarik adalah bahwa ketersediaan dan kualitas data terpilah memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong kebijakan publik yang responsif gender. Tanpa data yang kuat dan terkini, sulit bagi pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan strategi yang benar-benar menysasar akar masalah. Oleh karena itu, penyusunan profil gender ini tidak hanya menjadi produk dokumentatif, melainkan alat advokasi dan pijakan perencanaan yang berbasis bukti. Hal ini menjadikan pembangunan daerah bukan hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan yang inklusif.

Kota Jambi memiliki potensi besar untuk mengukuhkan diri sebagai daerah yang progresif dalam hal pengarusutamaan gender. Perangkat kebijakan telah mulai diarahkan ke sana, seperti pelibatan perempuan dalam Musrenbang, pengembangan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta peningkatan kapasitas lembaga pelayanan publik yang ramah perempuan dan anak. Akan tetapi, langkah tersebut masih perlu diperkuat dengan political will yang konsisten dan sinergi lintas sektor agar dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.

Kesetaraan gender bukan hanya urusan Perempuan tetapi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan. Buku ini menjadi bukti bahwa upaya pembangunan yang berkeadilan gender harus dijalankan secara kolektif, dengan komitmen kuat, kebijakan yang berpihak, dan partisipasi aktif semua elemen. Kesimpulan ini bukan akhir dari perjalanan,

melainkan awal dari gerakan transformasi yang lebih luas: menuju Jambi yang inklusif, adil, dan bermartabat bagi seluruh warganya.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam buku ini, terdapat sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat upaya pengarusutamaan gender dan perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

Pertama, diperlukan penguatan sistem pendataan yang terpilah menurut jenis kelamin, usia, dan kelompok rentan lainnya. Data yang akurat dan komprehensif akan menjadi fondasi dalam menyusun program kerja yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Pengembangan database berbasis digital yang terintegrasi antar perangkat daerah menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi perencanaan.

Kedua, sinergi antar lembaga sangat penting dalam menjalankan pendekatan lintas sektor. Upaya pemberdayaan perempuan tidak bisa berdiri sendiri; ia harus terhubung dengan layanan pendidikan, kesehatan, sosial, dan hukum. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari OPD terkait serta pelibatan aktif organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal dalam menjalankan program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketiga, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam hal penanganan kekerasan berbasis gender dan pelayanan psikososial. UPTD Perlindungan

Perempuan dan Anak harus diperkuat secara kelembagaan, termasuk SDM, anggaran, dan sarana pendukung lainnya. Selain itu, perlu dibangun jejaring advokasi di tingkat kelurahan dan kecamatan agar pendekatan perlindungan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Keempat, penting untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD, RKPD, dan Musrenbang. Pengarusutamaan gender harus menjadi prinsip yang melekat dalam setiap kebijakan, bukan sebagai tambahan administratif. Pelatihan dan sosialisasi tentang konsep gender serta pembangunan inklusif perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat umum.

Terakhir, perlu adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan terhadap program-program yang telah dijalankan. Dengan adanya indikator yang jelas dan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi, maka pembangunan yang berkeadilan gender dapat diwujudkan dengan lebih efektif dan akuntabel.